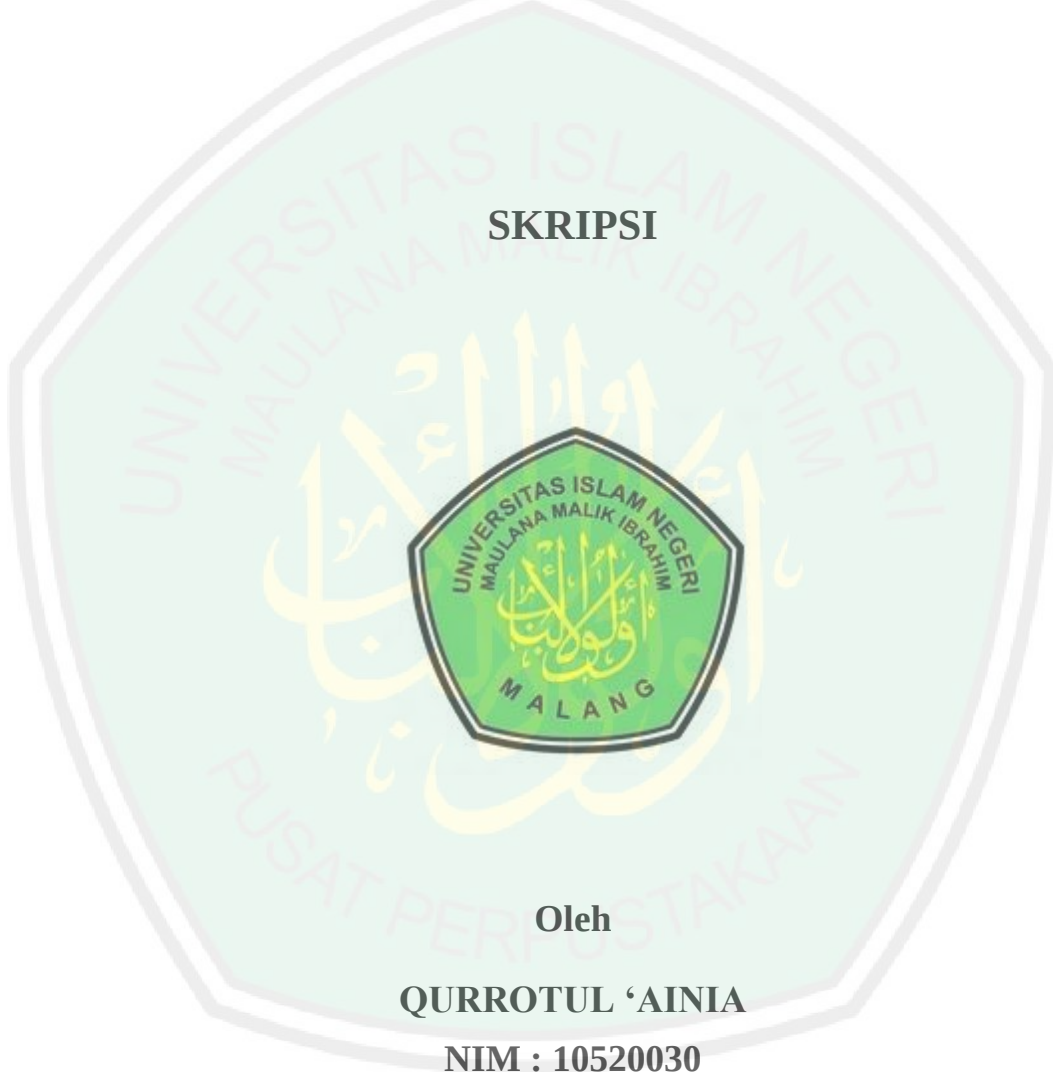


**PENERAPAN AKUNTANSI BERDASARKAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA
AKUNTABILITAS PUBLIK PADA KOPERASI PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA (KPRI) “SUKA MAKMUR”
KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI



Oleh

QURROTUL ‘AINIA

NIM : 10520030

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**PENERAPAN AKUNTANSI BERDASARKAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA
AKUNTABILITAS PUBLIK PADA KOPERASI PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA (KPRI) “SUKA MAKMUR”
KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

QURROTUL ‘AINIA

NIM 10520030

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENERAPAN AKUNTANSI BERDASARKAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA
AKUNTABILITAS PUBLIK PADA KOPERASI PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA (KPRI) "SUKA MAKMUR"
KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK**

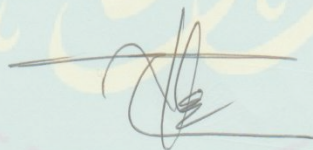
SKRIPSI

Oleh

**QURROTUL 'AINIA
NIM : 10520030**

Telah disetujui tanggal 21 Juni 2017

Dosen pembimbing,



Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA

NIP. 19771025 200901 2 006

Mengetahui:



Ketua Jurusan,

Hi. Naik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN AKUNTANSI BERDASARKAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA
AKUNTABILITAS PUBLIK PADA KOPERASI PEGAWAI
REPUBLIK INDONESIA (KPRI) "SUKA MAKMUR"
KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Oleh
QURROTUL 'AINIA
NIM : 10520030

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 13 Juli 2017

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua

Dr. Indah Yuliana, SE., MM
NIP. 19740919 200312 2 004

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Yona Octiani Lestari, SE., MSA, CSRS., CSRA:
NIP. 19771025 200901 2 006

3. Penguji Utama

Dr. H.A. Muhtadi Ridwan, M.Ag
NIP. 19550302 198703 1 004

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi,



Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Qurrotul 'Ainia
 NIM : 10520030
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENERAPAN AKUNTANSI BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) "SUKA MAKMUR" KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

adalah merupakan hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 20 Juli 2017

Hormat Saya,



[Handwritten signature of Qurrotul 'Ainia]

Qurrotul 'Ainia
 NIM : 10520030

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan hasil skripsiku ini untuk:

Ayah dan Ibuku Tercinta

H. Hasan Bisri (Alm) dan Ibu Hj. Jamilah. Terima kasih telah melahirkanku ke dunia yang indah ini dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, selalu mencintaiku, dan menyayangiku dengan sepenuh hati, memberikan perhatian yang tiada tara, selalu memenuhi setiap kebutuhanku dengan cepat dan doa yang tak pernah putus diucapkan. Serta tak pernah lelah mendukung, memotivasi dan mendoakan yang terbaik dalam proses penyelesaian skripsiku ini.

Kakak-kakakku Tersayang

Yang selalu menjadi sumber motivasi dan penyemangat bagiku menghadapi rintangan dalam proses penyelesaian skripsiku ini.

Teman-teman Terkasih

Baik yang ada di dekatku maupun yang terpisah jarak, terima kasih atas inspirasi, motivasi, bantuan, semangat, dukungan maupun keceriaan yang kalian hadirkan dalam proses penyelesaian skripsiku ini.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا

فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ

“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan (nasib) suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka (QS. Ar Ra’d: 11)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, Karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul *“Penerapan Akuntansi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”*.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA selaku dosen wali yang memberi motivasi dan arahan selama masa perkuliahan.
5. Ibu Yona Octiani Lestari, SE.,MSA., CSRS., CSRA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

7. Pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang telah memberikan izin dan membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua dan keluarga yang telah memberikan banyak do’a dan dukungan secara moril dan spirituil.
9. Semua teman-teman akuntansi yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin...

Malang, 20 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Batasan Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kajian Teoritis.....	14
2.2.1 Koperasi	14
2.2.1.1 Pengertian Koperasi	14
2.2.1.2 Tujuan Koperasi	17
2.2.1.3 Fungsi dan Peran Koperasi.....	17
2.2.1.4 Manfaat Koperasi	18
2.2.1.5 Prinsip Koperasi	19
2.2.2 Standar Akuntansi Keuangan ETAP	23
2.2.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan ETAP	23
2.2.2.2 Manfaat, Kelebihan dan Kekurangan SAK ETAP.....	26
2.2.2.3 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP	27
2.2.2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	34
2.2.3 Akuntansi	38
2.2.3.1 Pengertian Akuntansi	38

2.2.3.2 Akuntansi Dalam Perspektif Islam	39
2.3 Kerangka Berfikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
1.1 Lokasi Penelitian.....	43
1.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
1.3 Subjek Penelitian.....	44
1.4 Data dan Jenis Data	44
1.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
1.6 Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	50
4.1.1 Sejarah Berdirinya Instansi/Perusahaan.....	50
4.1.2 Visi dan Misi Instansi/Perusahaan	53
4.1.3 Struktur Organisasi Instansi/Perusahaan.....	54
4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan/Usaha Dari Instansi.....	66
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	73
4.2.1 Penyusunan Laporan KPRI “Suka Makmur”	79
4.2.1.1 Neraca	79
4.2.1.2 Laporan Laba Rugi.....	91
4.2.1.3 Laporan Perubahan Ekuitas.....	94
4.2.1.4 Laporan Arus Kas	95
4.2.1.5 Catatan Atas Laporan Keuangan.....	98
4.2.2 Membandingkan Sistem Laporan Keuangan KPRI “Suka Makmur” dengan SAK ETAP	100
4.2.2.1 Konsep Laporan Keuangan	100
4.2.2.2 Konsep Asset.....	101
4.2.2.3 Konsep Kewajiban	103
4.2.2.4 Konsep Ekuitas	105
4.2.2.5 Konsep Pendapatan	108
4.2.2.6 Konsep Beban	109
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	116
5.2 Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4.1	Daftar Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah	52
Tabel 4.2	Susunan Pengurus, Pengawas, dan Karyawan KPRI Suka Makmur Kecamatan Bungah.....	54
Tabel 4.3	Subklasifikasi Beban Menurut Fungsinya Pada KPRI Suka Makmur	94
Tabel 4.4	Perbandingan Laporan Keuangan KPRI Suka Makmur dengan SAK ETAP	100
Tabel 4.5	Perbandingan Konsep Asset pada KPRI Suka Makmur dengan SAK ETAP	101
Tabel 4.6	Perbandingan Konsep Kewajiban pada KPRI dengan SAK ETAP	103
Tabel 4.7	Perbandingan Konsep Ekuitas pada KPRI dengan SAK ETAP ...	105
Tabel 4.8	Perbandingan Konsep Pendapatan pada KPRI dengan SAK ETAP	108
Tabel 4.9	Perbandingan Konsep Beban pada KPRI dengan SAK ETAP	110
Tabel 4.10	Perbandingan Laporan Keuangan KPRI “Suka Makmur” Kecamatan Bungah dengan SAK ETAP	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir.....	42
Gambar 4.1	Struktur Organisasi KPRI “Suka Makmur” Kecamatan Bungah.....	56
Gambar 4.2	transaksi Kegiatan KPRI “Suka Makmur” Kecamatan Bungah.....	67
Gambar 4.3	Siklus Pencatatan Transaksi Pada KPRI “Suka Makmur” Kecamatan Bungah.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Laporan Keuangan Perusahaan
- Lampiran 3 Panduan Wawancara
- Lampiran 4 Biodata Peneliti
- Lampiran 5 Bukti Konsultasi



ABSTRAK

Ainia, Qurrotul. 2017, SKRIPSI. Judul: “Penerapan Akuntansi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik”

Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Dalam penyusunan laporan yang dibuat oleh koperasi harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman umum akuntansi koperasi dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa koperasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik, maka dipersyaratkan penyusunan laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada penyusunan laporan keuangannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yaitu berupa data: gambaran umum koperasi, kegiatan usaha koperasi dan laporan keuangan koperasi tahun 2016.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada penyusunan laporan keuangannya. Namun penerapan tersebut belum sepenuhnya terjadi. Hal ini dikarena laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi hanya berupa laporan neraca, laporan laba rugi (sisa hasil usaha), laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Tanpa membuat catatan atas laporan keuangan yang memuat tentang kebijakan akuntansi yang selama ini diterapkan oleh pihak koperasi dalam menjalankan usahanya. Padahal dalam SAK ETAP laporan keuangan yang baik terdiri dari 5 laporan keuangan.

ABSTRACT

Ainia, Qurrotul. 2017, THESIS. Title: "Accounting Implementation Based on Financial Accounting Standards Entity Without Public Accountability in Cooperative Employees of Republic Indonesia (KPRI) " Suka Makmur "Bungah Sub-District Gresik Regency"

Advisor : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA

Key words : Financial Statements, Financial Accounting Standards Entity Without Public Accountability, Cooperative

Cooperative is a business entity consisting of peoples or cooperative body based its activities on the principle of cooperatives as well as a people's economic movement based on the principle of kinship. In the preparation of reports made by cooperatives should be based on generally accounting standards. According to the Ministerial Regulation issued by the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic Indonesia Number 12 / Per / M.KUKM / IX / 2015 on the general guidance of cooperative accounting in Article 3 paragraph 1 which states that cooperatives that don't have public accountability, then preparation of financial statements is required referring to the Financial Accounting Standards of Entity Without Public Accountability (SAK ETAP).

This study aims to determine whether the Application of accounting to cooperatives Employees of the Republic Indonesia (KPRI) "Suka Makmur" Bungah Sub-district Gresik Regency has applied Financial Accounting Standards Entity Without Public Accountability (SAK ETAP) on the preparation of its financial statements. The type of research used in this study is qualitative research. Data from this research is obtained from interviews and documentation as follows: general overview of cooperative, cooperative business activities and financial statements of cooperative in 2016.

Based on the results of research obtained that Cooperative Employees of the Republic Indonesia (KPRI) "Suka Makmur" District Bungah Gresik Regency has applied Financial Accounting Standards Entity Without Public Accountability (SAK ETAP) on the preparation of financial statements. However, the application hasn't fully occurred. Because the financial statements made by the cooperative are only in the form of balance sheet, income statement report (residual result of business), report of changes in equity, and cash flow report. Without making notes on the financial statements containing the accounting policies that have been applied by the cooperative in running their business. Even though in SAK ETAP a good financial report consists of 5 financial statements.

مستخلص

العينية، قرة. 2017. البحث الجامعي. الموضوع: "تطبيق المحاسبة بمعيار الوحدات المحاسبية المالية بدون المساءلة العامة على تعاون موظف جمهورية إندونيسيا " Suka Makmur" بونجاه كرسيك".

المشرفة: يونا أوكتياني لستاري الماجستير.

الكلمات الأساسية: المحاسبة المالية، معيار الوحدات المحاسبية المالية بدون المساءلة العامة، التعاونية

التعاونية هي الكيان التجاري الذي يتألف من الأشخاص أو الكيان التعاوني الذي تقوم أنشطته على مبدأ التعاون والحركة الاقتصادية للمجتمع على أساس مبدأ القرابة. وفي إعداد التقرير الذي أحرزته التعاونية يجب أن تستند إلى معيار المحاسبة المقبولة عموماً. وهذا وفقاً بنظام الوزراء الذي يصدره وزير التعاون والشركة الصغيرة والمتوسطة من جمهورية إندونيسيا رقم 12/Per/M.KUKM/IX/2015 عن التوجيه العام في المحاسبة التعاونية في فصل 3 أية 1 الذي ينص على أن التعاونية التي لا تملك المساءلة العامة، فلا بد إعداد محاسبتها المالية تشير إلى معيار الوحدات المحاسبية المالية بدون المساءلة العامة.

يهدف هذا البحث لمعرفة تطبيق المحاسبة بمعيار الوحدات المحاسبية المالية بدون المساءلة العامة على تعاون موظف جمهورية إندونيسيا "Suka Makmur" بونجاه كرسيك في إعداد المحاسبة المالية. ومنهج البحث المستخدم هو البحث الكيفي. وللحصول على البيانات في هذا البحث من المقابلة والوثائق بشكل بيانات: لمحة عامة عن التعاونية الأنشطة التجارية التعاونية ومحاسبة المالية التعاونية سنة 2016.

بناءً على نتائج البحث القائم، إن تعاون موظف جمهورية إندونيسيا "Suka Makmur" بونجاه كرسيك قد طبق معيار الوحدات المحاسبية المالية بدون المساءلة العامة في إعداد المحاسبة المالية. ولكن التطبيق لم يجري تماماً. لأن المحاسبة المالية التي أحرزته التعاونية في شكل الميزانية العمومية حسب، وتقرير الربح خسارة، وتقرير التغيرات إنصاف، وتقرير التدفقات النقدية. دون صنع الوقائع على المحاسبة المالية التي تحتوي على السياسات المالية التي طبقها فريق التعاوني في تشغيل الأعمال. وبينما في SAK ETAP إن المحاسبة المالية الجيدة تتكون من خمس المحاسبات المالية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan Bangsa Indonesia merupakan wujud dari usaha untuk mencapai tujuan Nasional. Tujuan Nasional Bangsa Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bidang ekonomi pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa usaha yang sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi. Koperasi sebagai suatu sistem yang turut serta mewarnai kehidupan perekonomian indonesia telah memiliki legalitas tersendiri yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 (Mulyani,2013).

Koperasi merupakan salah satu bentuk dari organisasi yang mudah ditemui di Indonesia. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya atas dasar prinsip koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat sekitarnya, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi memiliki karakteristik utama yang membedakannya dengan badan usaha lain yaitu adanya identitas ganda pada anggotanya. Anggota koperasi berperan sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi

Semakin berkembangnya kegiatan usaha pada koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin besar. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan, untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan dari sistem informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan koperasi melalui akuntansi, khususnya merumuskan standar akuntansi keuangan untuk koperasi dalam penyusunan laporan keuangan (Nurdita,2012).

Berhasil tidaknya koperasi sangat dipengaruhi oleh anggotanya, sehingga pengurus koperasi dituntut untuk selalu berusaha semaksimal mungkin dalam pengelolaannya. Koperasi harus memperbaharui dirinya terutama pada mutu hubungan keanggotaannya dan tingkat teknologi yang pada saat ini mereka gunakan dalam usahanya (Davis dalam Triana,2012). Peran laporan keuangan sangat penting dalam mengukur perkembangan koperasi yang meliputi kemajuan dan kelancaran koperasi tersebut. Laporan keuangan koperasi dapat memberikan informasi tentang keuangan dan hasil operasi koperasi tersebut. Secara periodik koperasi selalu mengeluarkan laporan keuangan yang dibuat oleh pengurus koperasi dan dibagikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Umumnya laporan keuangan koperasi pada akhir periode kepengurusan dibukukan dalam buku laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi (Triana,2012:3).

Keterbatasan informasi akuntansi dan kelemahan pada pelaporan keuangan yang tidak terstruktur dengan baik dan dan tidak terstandart berakibat pada sulitnya koperasi-koperasi di Indonesia memperoleh bantuan dana atau

permodalan dari pemerintah, mitra kerja ataupun perbankan. Kondisi tersebut tentunya akan mempersulit koperasi untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Alasan utama sulitnya pemerintah memberikan bantuan kepada koperasi adalah karena sulitnya mencari data formal seperti laporan keuangan dan rencana bisnis yang belum jelas. Oleh sebab itu, para pelaku koperasi secara tidak langsung dituntut untuk melakukan pelaporan keuangan yang formal dan terstruktur sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku agar dapat dipahami dan tidak hanya oleh pemilik tetapi juga oleh pihak lain, seperti pemerintah ataupun perbankan yang akan memberikan permodalan (Azaria,2013).

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas usaha tersebut. Sehingga laporan keuangan memegang peranan penting yang luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan (Utami,2012:8). Pengertian laporan keuangan menurut Zaki Baridwan (2010:17) menyatakan bahwa: “Laporan Keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan”.

Laporan keuangan koperasi selain merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi, juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus tentang kehidupan koperasi. Hal ini diungkapkan (Sitio dan Tamba, 2001:111) bahwa “laporan keuangan koperasi pada dasarnya tidak berbeda dengan laporan keuangan yang dibuat oleh badan usaha lain seperti badan usaha swasta dan badan

usaha milik negara”. Dalam penyusunan laporan keuangannya, koperasi juga harus memperhatikan standar yang digunakan.

Seiring dengan berkembangnya zaman, Koperasi saat ini dituntut untuk lebih transparan dalam melaporkan setiap hasil dari aktivitas yang telah dicapai dalam melakukan kegiatannya. Sama halnya dengan organisasi lain, salah satu bentuk transparansi yang harus dilakukan koperasi adalah dengan cara menyusun dan menerbitkan laporan keuangan organisasi dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini senada dengan Peraturan Menteri yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman umum akuntansi koperasi dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa koperasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik, maka dipersyaratkan penyusunan laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia. Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri yang berada disuatu instansi pemerintahan atau para pegawai negeri di suatu Kota atau Kabupaten. KPRI adalah salah satu jenis Koperasi yang keberadaanya cukup banyak di Indonesia dan tersebar disetiap Kabupaten dan Kota. KPRI “Suka Makmur” merupakan koperasi yang berada di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Koperasi ini bergerak dalam bidang pertokoan dan juga jasa seperti simpan pinjam. Pada awal berdirinya koperasi pada tahun 1978 jumlah anggota yang mereka miliki berjumlah 53 orang dan hingga pada tahun 2016 jumlah

anggota yang bergabung sebesar 327 orang. Pada awal dibentuknya kantor koperasi ini masih berada di lingkungan Sekolah Dasar Negeri Bungah I, namun seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya anggota pada koperasi maka pada tahun 1987 koperasi dapat membangun dan menempati kantor baru hingga sampai saat ini. Sedangkan Ketua, pengurus dan pengawas yang ada pada koperasi merupakan anggota dari koperasi itu sendiri. Mereka dipilih secara periodisasi yaitu setiap 3 tahun sekali melalui diselenggarakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam menjalankan kegiatannya koperasi pada tahun 2016 ini koperasi juga terkadang mengikuti Rapat Dinas Instansi yang terdiri dari rapat dengan Dinas Koperasi dan Dekopinda. Selain itu juga koperasi pernah mengikuti pelatihan atau pembinaan dari Dinas Koperasi mengenai pelaporan keuangan yang berdasarkan SAK ETAP. Hal ini diharapkan agar para pengurus koperasi dapat memahami SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen koperasi. Laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen sendiri biasanya tertuang dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk dilakukan pertanggungjawaban kepada para anggota koperasi.

Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 19 Mei 2009 telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Standar ini mengungkapkan bahwa entitas tanpa akuntabilitas publik dan entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal di Indonesia menerapkan SAK ETAP dalam pelaporan keuangannya. Karena dengan penerapan SAK ETAP akuntabilitas, transparansi dan relevansi laporan keuangan koperasi dapat diwujudkan. Koperasi Pegawai Republik Indonesia

(KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah adalah termasuk entitas tanpa akuntabilitas publik dan entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal, oleh karena itu, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah juga perlu menerapkan SAK ETAP dalam pelaporan keuangannya. Mengingat aset yang dimiliki oleh koperasi cukup besar yaitu Rp. 3.946.001.503. tentu dengan aset senilai itu dan dana yang berasal dari penjualan dan simpanan para anggota sehingga menyebabkan adanya tuntutan terkait pelaporan yang lebih transparan bagi para anggotanya. Selain itu Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah telah berbadan hukum resmi sehingga sudah wajib bagi koperasi untuk menerapkan SAK ETAP dalam pelaporan keuangannya.

Standar akuntansi keuangan koperasi yang berlaku di Indonesia adalah SAK ETAP. Namun berdasarkan hasil dari penjelasan dari dinas koperasi, diketahui masih banyak koperasi pada khususnya belum menerapkan SAK ETAP. Berdasarkan hasil penelitian Putro (2013) menyatakan bahwa alasan suatu koperasi belum menerapkan SAK ETAP adalah karena SAK ETAP untuk standar penyusunan laporan keuangan koperasi dinilai kurang untuk diterapkan pada koperasi. Hal ini dikarenakan untuk hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam SAK ETAP masih mengacu pada PSAK No. 27. Alasan lain juga diungkap oleh penelitian yang dilakukan oleh Widhoretno (2011) yang menyatakan bahwa suatu koperasi yang diteliti tidak menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan karena Catatan Atas Laporan Keuangan Kopwan Setia Bhakti Wanita yang dijadikan objek penelitian tidak didapatkan selama proses pencarian data. Hal ini

karena keberadaan Catatan Atas Laporan Keuangan disesuaikan dengan kebijakan koperasi.

Berdasarkan Uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada KPRI “Suka Makmur” Kecamatan Bungah. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul sebagai berikut : “PENERAPAN AKUNTANSI BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) “SUKA MAKMUR” KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK”.

1.2 Rumusan Masalah

Koperasi dalam menjalankan usaha perlu menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Semakin berkembangnya koperasi, sangat perlu diikuti dengan pengelolaan manajemen yang dapat mendukung terhadap kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

“Apakah pada penerapan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

“Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada penyusunan laporan keuangannya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis adalah sebagai bahan pembanding antara teori yang didapatkan diperkuliahan dengan fakta di lapangan dan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sehubungan dengan penerapan akuntansi pada koperasi. Terutama yang terjadi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah.
2. Bagi koperasi khususnya pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah adalah sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam penerapan akuntansi pada koperasi. Mengingat penerapan akuntansi sangat berperan penting dalam usahanya untuk melihat bagaimana keadaan usaha yang sedang dijalaninya.
3. Bagi Mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan akuntansi dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan bahan rujukan untuk dilakukannya pengembangan penelitian lebih lanjut.

4. Bagi pihak kampus terutama Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi dapat dijadikan tambahan koleksi literatur yang ada dipergustakaan untuk dijadikan sebagai bahan bacaan oleh mahasiswa-mahasiswi guna mencari informasi tentang penerapan akuntansi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah dan tambahan ilmu Tentang akuntansi.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih efektif dan efisien, terarah dan dapat dikaji lebih dalam, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Oleh karena itu, penulis akan membatasi ruang lingkup permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut:

- a. Koperasi yang diteliti hanya berpusat pada 1 (satu) koperasi saja yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah.
- b. Penerapan akuntansi yang dipakai adalah penyusunan laporan keuangan yang dimiliki oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah yaitu pada pos-pos laporan keuangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Menurut Andreas (2014) dalam skripsinya yang berjudul Evaluasi Atas Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus pada KPRI di Kota Bandar Lampung) menyatakan bahwa KPRI sudah melakukan pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan namun sebagian besar laporan keuangan yang disajikan oleh KPRI tidak sesuai dengan SAK ETAP. Lewat hasil wawancara penulis menemukan banyak faktor yang menyebabkan KPRI tidak menyajikan laporan keuangan sesuai SAK ETAP. Antara lain: Kurangnya sumber daya manusia yang menguasai SAK ETAP serta kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang SAK ETAP kepada pengurus KPRI. Penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP perlu dilakukan oleh KPRI agar laporan keuangan yang disajikan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi KPRI tersebut.

Ariantini (2014) dengan judul Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Lembang Sejahtera Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi belum sepenuhnya mengadopsi SAK ETAP, dan penerapan SAK ETAP pada koperasi berimplikasi pada penurunan

sis hasil usaha KSP Lembing Sejahtera Mandiri karena adanya biaya yang tidak tercatat.

Pratiwi (2014) dengan judul Analisis Penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan PT. Nichindo Manado Suisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK) serta terjadi inkonsistensi dalam penyajian beberapa pos pada Neraca yang tidak diungkapkan dalam CALK.

Menurut Nurdita (2013) menyimpulkan dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi yang ada di Kota Dumai bahwa secara garis besar pengurus koperasi yang ada di kota Dumai telah menerapkan akuntansi sederhana dalam pelaporan pertanggungjawaban. Tetapi laporan keuangan yang diselenggarakan masih belum sesuai dengan format SAK ETAP.

Menurut Ni Nyoman Pera Yati, Anantawikrama Tungga Atmadja, I Made Pradana Adi Putra (2013), dalam jurnal penelitian yang berjudul Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Mahasiswa Citra Dana Universitas Pendidikan Ghanesa Tahun Buku 31 Desember 2013 berdasarkan SAK ETAP diperoleh kesimpulan bahwa penyajian laporan keuangan Koperasi Mahasiswa Citra Dana tahun 2013 telah sesuai dengan SAK ETAP namun belum lengkap. Hal ini berdasarkan atas alasan koperasi yang belum menerapkan SAK ETAP adalah karena kurangnya kompetensi sumber daya manusia, tidak adanya pembinaan dari dinas koperasi serta tidak adanya tuntutan dari dinas koperasi maupun masyarakat

terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAK ETAP. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh manajemen koperasi. Laporan keuangan yang telah disajikan atas laporan keuangan dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh manajemen koperasi.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Judul Penelitian / Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Beth Sianne Andreas, Evaluasi Atas Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus pada KPRI di Kota Bandar Lampung), 2014	- Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif - Objek penelitian yang digunakan Koperasi, yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia - Tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan SAK ETAP pada pelaporan Koperasi	- Lokasi penelitian yang dilakukan tidak sama. - Penelitian terdahulu dilakukan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang ada di Kota Bandar Lampung dan jumlah objek yang dilakukan lebih dari 1 objek - Penelitian yang sekarang ini dilakukan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang ada di kecamatan bungah
2	Ni Luh Gede Ariantini, Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Lembang Sejahtera Mandiri, 2014	- Objek penelitian yang digunakan yaitu Koperasi - Tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan SAK ETAP pada pelaporan Koperasi	- Beda jenis penelitian dan jenis objek penelitian - Penelitian terdahulu Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dan jenis objek penelitian memakai Koperasi

No	Nama Peneliti / Judul Penelitian / Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Simpan Pinjam yang ada di Singaraja Bali - Penelitian sekarang jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dan jenis objeknya Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kecamatan Bungah
3	Ade Astalia Pratiwi, Analisis Penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan PT. Nichindo Manado Suisan, 2014	- Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif - Tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan suatu perusahaan	- Beda objek dan lokasi penelitian - Penelitian terdahulu memakai objek pada suatu perusahaan yang ada di Manado - Penelitian sekarang memakai objek Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kecamatan Bungah
4	Raflesia Nurdita JS, Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi yang ada di Kota Dumai, 2013	- Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif - Objek penelitian yang digunakan yaitu Koperasi - Tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui penerapan SAK ETAP pada penyusunan laporan Koperasi	- Lokasi penelitian yang dilakukan tidak sama. - Penelitian terdahulu dilakukan di koperasi yang ada di Kota Dumai - Penelitian yang sekarang ini dilakukan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang ada di kecamatan bungah
5	Ni Nyoman Pera Yati, Anantawikrama Tungga Atmadja, I Made Pradana Adi	- Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif	- Lokasi penelitian yang dilakukan tidak sama. - Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti / Judul Penelitian / Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Putra, Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Mahasiswa Citra Dana Universitas Pendidikan Ghanesa Tahun Buku 31 Desember 2013 berdasarkan SAK ETAP , 2013	- Objek penelitian yang digunakan yaitu Koperasi - Tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui cara penyajian laporan koperasi berdasarkan SAK ETAP	- dilakukan di Koperasi Mahasiswa yang ada di Singaraja Bali - Penelitian yang sekarang ini dilakukan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang ada di kecamatan bungah

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Koperasi

2.2.1.1 Pengertian Koperasi

Sejarah koperasi lahir pada permulaan abad ke-19 sebagai suatu reaksi terhadap sistem perekonomian kapitalisme di Negara-negara Eropa. Sistem ekonomi ini bersendi pada kebebasan individu untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin. Akibatnya kelompok-kelompok tertentu yakni kaum kapitalis, menguasai kehidupan masyarakat luas. Mereka hidup berlebihan, sedang masyarakat yang tidak memiliki modal makin tertindas. Pada saat itulah tumbuh aliran kebersamaan yang menentang aliran individualisme ini dengan asas kebersamaan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Bentuk kerjasama ini melahirkan suatu perkumpulan yang dinamakan koperasi.

Istilah koperasi sebenarnya berasal dari bahasa asing yaitu *Co-Operation* dimana *Co* berarti bersama dan *Operation* berarti usaha. Secara harfiah koperasi dapat diartikan sebagai usaha bersama. Pengertian ini juga dapat diaplikasikan

secara sederhana misalnya KUD (Koperasi Unit Desa) sebagai usaha bersama suatu kelompok masyarakat di suatu wilayah desa, KOPKAR (Koperasi Karyawan) sebagai usaha bersama karyawan yang bekerja bersama dalam satu institusi, lembaga atau perusahaan.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi diartikan sebagai :

“badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal tersebut menjelaskan dalam koperasi harus ada prinsip-prinsip koperasi sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan perkoperasian tersebut. Yang paling penting dalam pengertian ini adalah bahwa koperasi merupakan badan usaha yang berdiri atas asas kekeluargaan, berbeda dengan badan usaha lain, yang melandasi kegiatan usahanya hanya untuk mencari laba”.

Sedangkan koperasi menurut Moh. Hatta yang dikemukakan oleh (Sumarsono,2003:3) dalam bukunya “Manajemen Koperasi Teori dan Praktek” menyatakan bahwa :

“Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya”. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi di dahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan”.

Sedangkan menurut ILO (*International Labour Organization*) yang dikemukakan oleh (Sumarsono,2003:3) dalam bukunya “Manajemen Koperasi Teori dan Praktek” menyatakan bahwa :

“Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia

menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan”.

Sedangkan pengertian koperasi yang dikemukakan oleh (Rudianto,2010:4) dalam bukunya “Akuntansi Koperasi” menyatakan bahwa :

“Suatu perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”.

Dari definisi yang ada tentang koperasi, terdapat hal-hal yang menyatukan pengertian tentang koperasi, antara lain :

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.
2. Koperasi adalah bentuk kerjasama dalam koperasi yang bersifat sukarela.
3. Koperasi adalah perusahaan yang berasaskan kekeluargaan.
4. Masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Sedangkan koperasi yang baik seharusnya memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut : (Zulkarnain,2008:31-32)

1. Anggotanya terikat pada satu keperluan dan tujuan.
2. Semangat berjuang bersama dan saling mendukung.
3. Pemilikan bersama serta mempertahankannya bersama.
4. Meningkatkan kesejahteraan anggota.

.

2.2.1.2 Tujuan Koperasi

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam pasal 3 disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan bunyi pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 itu, dapat disaksikan bahwa tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi 3 hal sebagai berikut :

- a. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.
- b. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
- c. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Dari penjelasan tujuan tersebut, hal ini mengandung makna bahwa tujuan koperasi tidak berfokus pada pencarian laba karena tolak ukur utama yang menjadi pertimbangan adalah kesejahteraan para anggotanya.

2.2.1.3 Fungsi dan Peran Koperasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam pasal 4, koperasi mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional.

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.2.1.4 Manfaat Koperasi

Berdasarkan fungsi dan peran koperasi, maka manfaat koperasi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu manfaat koperasi di bidang ekonomi dan manfaat koperasi di bidang sosial.

1. Manfaat koperasi di bidang ekonomi :
 - a. Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya.
 - b. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.
 - c. Menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan.
 - d. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi.
 - e. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif dan membiasakan untuk hidup hemat.
2. Manfaat koperasi di bidang sosial :
 - a. Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tentram.
 - b. Mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan-hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan.

- c. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dan semangat kekeluargaan.

2.2.1.5 Prinsip Koperasi

Di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan pada pasal 5 bahwa dalam pelaksanaannya, sebuah koperasi harus melaksanakan prinsip koperasi. Berikut ini beberapa prinsip koperasi yaitu :

1. Keanggotaan bersifat sukarela.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.

Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut :

- a. Pendidikan Perkoperasian.
- b. Kerjasama antar Koperasi.

Apa yang dapat di informasikan oleh prinsip-prinsip ini merupakan pedoman atau norma-norma, atau nilai-nilai (*property right*) yang sering kali harus memberikan pedoman bagi kegiatan-kegiatan organisasi yang disebut koperasi itu sendiri.

Dalam penjelasan dari pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tersebut, diuraikan bahwa prinsip koperasi adalah merupakan satu kesatuan dan

tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas serta jati diri koperasi. Dengan adanya prinsip tersebut, koperasi dapat dibedakan dari badan usaha lainnya, karena adanya :

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota Koperasi tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Walaupun dalam pelaksanaannya koperasi diperhadapkan pada aspek ketidakpastian (*uncertainly*), sebagai organisasi yang memiliki peran ganda, koperasi sebenarnya sangat diuntungkan dengan prinsip ini karena selain memfasilitasi seluruh pihak tanpa ada pembatasan, koperasi juga dapat memupuk modal yang besar dengan ketertiban anggota secara sukarela.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar (Pasal 19 ayat 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992). Dalam suatu negara, telah terbukti bahwa sistem demokrasi telah meningkatkan motivasi dan kreativitas masyarakat dalam berbuat yang terbaik bagi negara karena pengelolaan negara diselenggarakan

dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berkaitan dengan Koperasi, semestinya penerapan prinsip ini memberikan ruang keterlibatan sebanyak mungkin bagi anggota dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan motivasi, kreativitas dan partisipasi anggota.

- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing

Prinsip ini menggambarkan adanya pembagian SHU kepada anggota yang tidak terbatas berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap Koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. Dalam beberapa perusahaan, walaupun berbeda konteksnya sebenarnya secara tidak langsung juga menerapkan prinsip ini dalam strategi pemasarannya. Misalnya beberapa supermarket atau swalayan, dengan sistem keanggotaan (*membership*) yang mereka berlakukan ternyata mampu menjaga loyalitas pelanggannya yang pada akhirnya meningkatkan keuntungannya. Untuk itu, jika prinsip ini dilakukan secara konsisten oleh Koperasi maka tidak diragukan lagi dapat meningkatkan loyalitas anggota koperasi terhadap koperasi.

- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Modal pada Koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud

dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Penerapan prinsip ini mengidentifikasi perlunya kesetiakawanan maupun solidaritas antar sesama anggota koperasi sehingga dapat memberikan sesuatu yang lebih kepada anggota dibandingkan usaha-usaha lainnya.

e. Kemandirian

Prinsip kemandirian merupakan perwujudan bahwa koperasi harus mampu berdiri, tanpa bergantung pada pihak lain dan melakukan pengelolaan secara bertanggungjawab, transparan dan akuntabel. Prinsip ini telah menjadi suatu tujuan utama yang umumnya diharapkan oleh seluruh organisasi. Dengan kemandirian, suatu organisasi dapat mengelola dan mengembangkan organisasinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi tersebut tanpa ada intervensi pihak lain sehingga hasilnya pun dapat dinikmati oleh organisasi tersebut. Dengan penerapan prinsip ini, berarti bahwa dalam melakukan pelayanan kepada anggota, koperasi tidak bisa mengabaikan kredibilitas koperasi, sehingga dapat lebih mensejahterakan anggota.

f. Pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi

Dalam menunjang tercapainya kemandirian dan pengembangan koperasi maka prinsip pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi menjadi bagian penting yang mutlak untuk dilakukan. Melalui kedua prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan dan memperkuat pemahaman anggota, pengurus, badan pengawas dan manajemen dalam mewujudkan tujuan koperasi, serta dapat menciptakan jaringan yang

luas bagi koperasi baik ditingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional dalam melakukan kerjasama untuk menunjang pengembangan koperasi. Pelaksanaan kedua prinsip ini mutlak dilakukan dalam era globalisasi ini, karena untuk bisa berkompetisi apapun organisasinya, faktor pengetahuan dan jaringan usaha akan memberikan andil besar dalam mendukung kemampuan organisasi tersebut berkompetisi termasuk koperasi.

2.2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

2.2.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK ETAP) akan dinyatakan efektif berlaku untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, entitas akuntabilitas publik adalah entitas yang: (SAK ETAP,2009:1)

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan.
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Kriteria ETAP tersebut, bisa dibedakan dengan entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, yaitu jika: (SAK ETAP,2009:1)

- a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Oleh sebab itu Bapepam sendiri telah mengeluarkan surat edaran (SE) Bapepam-LK No. SE-06/BL/2010 tentang larangan penggunaan SAK ETAP bagi lembaga pasar modal, termasuk emiten, perusahaan publik, manajer investasi, sekuritas, asuransi, reksa dana, dan kontrak investasi kolektif.
- b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Pada umumnya, entitas tanpa akuntabilitas publik adalah UMKM dan Koperasi, oleh karena itu pengguna ETAP akan banyak terdiri dari entitas dengan kategori UMKM dan Koperasi. Penerbitan PSAK ETAP oleh Dirjen Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ini adalah sebagai alternatif PSAK yang boleh diterapkan oleh entitas di Indonesia, sebagai bentuk PSAK yang lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK Umum yang lebih rumit. Pada 1 Januari 2011 nanti, setiap entitas diberikan pilihan apakah akan menggunakan PSAK umum, atau PSAK ETAP. Apabila entitas tersebut memenuhi kriteria entitas publik, maka tentu tidak ada pilihan lain kecuali menerapkan PSAK umum. Namun jika tidak termasuk entitas yang

memiliki akuntabilitas publik, maka entitas dapat memilih menerapkan PSAK ETAP atau PSAK Umum.

Menurut kebijakan yang diterbitkan oleh DSAK IAI, pada 1 Januari 2011, suatu entitas tanpa akuntabilitas publik, dapat memilih untuk menerapkan PSAK ETAP atau PSAK Umum. Apabila pada tahun 2011 suatu entitas tanpa akuntabilitas publik pada menetapkan penggunaan PSAK umum, maka entitas tersebut setelah tahun 2011 tidak boleh merevisi kebijakan akuntansinya dengan menggunakan PSAK ETAP. Oleh karena adanya kebijakan tidak boleh merevisi ke PSAK ETAP itu, maka tahun 2011 ini menjadi tahun yang sangat menentukan dan strategis bagi pengambilan keputusan PSAK mana yang akan dipakai.

Karena aktivitas penyesuaian hanya perlu dilakukan oleh Entitas yang akan menerapkan PSAK ETAP, maka terhadap entitas tanpa akuntabilitas publik saat ini adalah waktu yang penting untuk mulai melakukan pertimbangan apakah akan menerapkan PSAK ETAP atau melanjutkan PSAK Umum. Pertimbangan itu perlu dilakukan karena:

- a. Penerapan suatu PSAK menyangkut isu strategis.
- b. Sekali entitas menetapkan menggunakan PSAK Umum maka tidak ada kesempatan lagi untuk merevisi ke PSAK ETAP.

Bagi perusahaan yang akan menerapkan PSAK ETAP di tahun 2011, persiapan penyesuaian laporan keuangan ke PSAK ETAP perlu dilakukan sejak tahun 2010. Pada catatan laporan keuangan tahun 2010 perlu mengungkapkan PSAK ETAP yang akan diterapkan pada tahun 2011, serta dampaknya pada laporan keuangan 2010 seandainya pada laporan keuangan diterapkan PSAK

ETAP. Kemudian, pada awal tahun 2011 sudah perlu dilakukan beberapa koreksi penyesuaian sebagai dampak atas beberapa PSAK umum yang ditiadakan dalam PSAK ETAP, seperti peniadaan pajak tangguhan, kapitalisasi biaya pinjaman, dan lain-lain. Pada penyajian laporan keuangan komparatif tahun 2011, laporan keuangan tahun sebelumnya memerlukan penyajian kembali (*restatement*).

Alasan mengapa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Lebih disarankan untuk dipakai dalam penyusunan laporan keuangan bagi Koperasi dikarenakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang Mengadopsi *International Financial Reporting Standard* (IFRS) terlalu kompleks jika untuk diterapkan oleh perusahaan Koperasi di Indonesia. Oleh karena itu, SAK ETAP dianggap cocok untuk karakter bisnis Koperasi khususnya yang terdapat di Indonesia.

2.2.2.2 Manfaat, Kelebihan dan Kekurangan SAK ETAP

Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan dalam menerapkan SAK-ETAP . Diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Koperasi dapat menyusun laporan keuangan sendiri dan dapat diaudit serta mendapat opini audit yang nantinya akan digunakan untuk memperoleh pinjaman dana dari pihak eksternal (bank).
2. SAK-ETAP lebih sederhana dalam implementasinya dibanding PSAK-IFRS (SAK-UMUM).
3. Ketiga, meskipun lebih sederhana, namun SAK-ETAP ini tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

Sedangkan kelebihan SAK-ETAP adalah lebih sederhana dibandingkan dengan SAK-UMUM, sehingga mudah digunakan bagi Koperasi di Indonesia. Standar-standar dalam SAK-ETAP juga tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga SAK-ETAP bisa relatif konsisten. Maka, proses penyusunan pun akan hemat biaya dan tenaga.

Sedangkan kekurangan SAK-ETAP adalah kesederhanaan penyajian laporannya dapat menyebabkan banyak mengabaikan hal yang tidak relevan, artinya banyak pula informasi yang tidak diungkapkan secara wajar.

2.2.2.3 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Laporan Keuangan Menurut (Raharjo,2002:45) dalam bukunya “Akuntansi Keuangan Untuk Manajer Non Keuangan” menyatakan bahwa:

“Laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak luar perusahaan. Yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham), pemerintah (instansi pajak), kreditur (bank atau lembaga keuangan) dan pihak-pihak lain yang berkepentingan”.

Adapun laporan keuangan menurut (Kieso dkk, 2007:2) dalam bukunya “Intermediate Accounting” menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter”.

Sedangkan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia PSAK No.1 (2009) suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Susunan laporan keuangan yang sering atau umumnya dibuat oleh para pelaku bisnis untuk menilai perkembangan dari usaha yang didirikannya yaitu terdiri dari posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP meliputi :

a. Neraca

Neraca atau laporan posisi keuangan adalah laporan yang menyajikan asset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada tanggal tertentu – akhir periode pelaporan. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan pada neraca, tetapi dalam SAK ETAP 4.2 disebutkan bahwa neraca minimal mencakup pos-pos berikut: (SAK ETAP,2009:19)

- kas dan setara kas
- piutang usaha dan piutang lainnya
- persediaan
- properti investasi
- aset tetap
- aset tidak berwujud
- utang usaha dan utang lainnya
- aset dan kewajiban pajak
- kewajiban diestimasi
- ekuitas

Bentuk penyajian aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang harus disajikan dalam klarifikasi

terpisah dalam neraca sesuai yang disebutkan paragraf 4.5, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya (SAK ETAP,2009:19).

b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan yang merupakan bagian dari laporan keuangan yang memuat informasi mengenai hasil operasi perusahaan, baik itu pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu pada suatu perusahaan. Berdasarkan SAK ETAP 5.3, laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: (SAK ETAP,2009:23)

- pendapatan
- beban keuangan
- bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan ekuitas
- beban pajak
- laba atau rugi neto

SAK ETAP mengharuskan entitas menyajikan pos, judul, sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Hal yang dilarang adalah entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa” baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan (SAK ETAP,2009:24).

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh dan deviden dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut. Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas yaitu : (SAK ETAP,2009:26)

- Laba atau rugi untuk periode
- Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas
- Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan
- Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat yang dilakukan pada awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari : a) laba atau rugi; b) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; c) jumlah investasi, deviden dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasuri, dan deviden serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.

d. Laporan Arus Kas

SAK ETAP menyebutkan dalam bab 7 laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan (SAK ETAP,2009:28). Sedangkan informasi yang disajikan dalam laporan arus kas terdiri dari:

- Aktivitas Operasi

SAK ETAP 7.4 menjelaskan aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah: (SAK ETAP,2009:29)

- a) penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa
- b) penerimaan kas dari *royalty, fees*, komisi dan pendapatan lain
- c) pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa
- d) pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan
- e) pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi
- f) penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.

- Aktivitas Investasi

Berdasarkan SAK ETAP 7.5 Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang

bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah: (SAK ETAP,2009:29)

- a) pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya
 - b) penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya
 - c) pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam *joint venture* (selain pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan)
 - d) penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari *joint venture* (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan)
 - e) uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain
 - f) penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain
- **Aktivitas Pendanaan**

Aktivitas pendanaan berhubungan dengan pendanaan atas perusahaan itu sendiri. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan menurut SAK ETAP 7.6 adalah: (SAK ETAP,2009:30)

- a) penerimaan kas dari penerbitan saham efek ekuitas lain
- b) pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas
- c) penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka panjang lainnya
- d) pelunasan pinjaman
- e) pembayaran kas oleh *lesse* untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Berdasarkan SAK ETAP 8.2, catatan atas laporan keuangan harus: (SAK ETAP,2009:34)

- a) menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu.
- b) mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan, dan
- c) memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Dalam paragraf 8.4 disebutkan bahwa secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut : (SAK ETAP,2009:34)

1. suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan

SAK ETAP.

2. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan.
3. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan yang sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
4. Pengungkapan lain.

2.2.2.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi penggunanya. Lebih lanjut dalam SAK ETAP dalam paragraf 2.1 hingga paragraf 2.11 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu (SAK ETAP,2009:2).

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna

untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu (SAK ETAP,2009:2).

3. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstament*). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas (SAK ETAP,2009:3).

4. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal, informasi yang memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan untuk pengambilan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu (SAK ETAP,2009:3).

5. Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumannya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan (SAK ETAP,2009:3).

6. Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya pertimbangan sehat tidak mengizinkan bias (SAK ETAP,2009:4).

7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi (SAK ETAP,2009:4).

8. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut (SAK ETAP,2009:4).

9. Tepat Waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan menyediakan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi (SAK ETAP,2009:5).

10. Keseimbangan Antara Biaya dan Manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Namun

demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal (SAK ETAP,2009:5).

2.2.3 Akuntansi

2.2.3.1 Pengertian Akuntansi

Setiap usaha dalam masyarakat baik usaha yang bertujuan mencari laba maupun tidak, selalu berusaha mengambil suatu keputusan yang tepat pada waktu berjalannya usaha maupun untuk masa yang akan datang.

Pengertian akuntansi yang dikemukakan oleh (Weygant dkk.,2007:4) dalam bukunya “Pengantar Akuntansi” adalah sebagai berikut :

“akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan”.

Sedangkan akuntansi menurut (Niswonger dkk,2003:6) dalam bukunya “Prinsip-prinsip Akuntansi” menyatakan bahwa :

“akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Pengertian akuntansi menurut Komite Terminologi AICPA (The Committen Terminology of the American Instituteof Certified Public

Accountants) dalam buku karangan (Belkaoui dan Riahi,2006:50) dalam bukunya

“Teori Akuntansi” menyatakan bahwa :

“akuntansi adalah seni pencatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan mata uang dan penginterpretasian hasil tersebut”.

Sedangkan akuntansi menurut American Accounting Association (AAA) dalam buku karangan (Soemarso,2002:5) dalam bukunya “Akuntansi Suatu Pengantar” menyatakan bahwa :

“akuntansi merupakan suatu proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.

Dari keseluruhan pengertian akuntansi diatas dapat dilihat bahwa akuntansi merupakan aktifitas dalam perusahaan yang menghasilkan informasi akuntansi tentang kondisi keuangan. Informasi akuntansi tersebut didapat melalui proses pengidentifikasian transaksi, penacatan, penggolongan, dan pelaporan laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat pertimbangan dan mengambil keputusan.

2.2.3.2 Akuntansi Dalam Perspektif Islam

Akuntansi adalah pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran yang umumnya bersifat keuangan yang nantinya akan menghasilkan suatu laporan yang disebut laporan keuangan. Akuntansi merupakan cabang ilmu Ekonomi yang mengalami perkembangan yang pesat disemua sektor baik swasta maupun

pemerintah. Yang namanya perusahaan modern pasti menerapkan dan memakai standar akuntansi dalam pelaporan keuangannya.

Akuntansi yang merupakan cabang ilmu ekonomi yang saat ini sangat pesat perkembangannya disemua sektor baik swasta maupun publik, ternyata konsep dasarnya telah diperkenalkan oleh al-Qur'an jauh sebelum Lucas Pacioli (dikenal dengan "Bapak Akuntansi) memperkenalkan konsep akuntansi *double-entry bookkeeping* dalam salah satu buku yang dituliskannya pada tahun 1494. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Surat al-Baqarah (2) ayat 282 di bawah ini, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ج وَ لِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ج وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ج فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ج فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ج وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ صلى فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ج وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ج وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ج ذَلِكَُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا صلى إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا قلى وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ قلى وَاتَّقُوا اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Menurut Ibnu Katsir Qs. Al-Baqarah ayat (282) diatas menjelaskan bahwa apabila melakukan *mu'amalah* supaya ditulis untuk dapat terjaga terhadap apa yang disepakati serta menjadi kekuatan hukum bagi saksi. Kemudian mengenai frasa “janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis” Ibnu Katsir menjelaskan orang yang ahli dalam ilmu penulisan tidak boleh menolak jika ada masyarakat yang meminta bantuan dan dilarang menyusahkan mereka.¹

Dengan kata lain, Islam menganggap bahwa transaksi ekonomi (muamalah) memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi, sehingga adanya

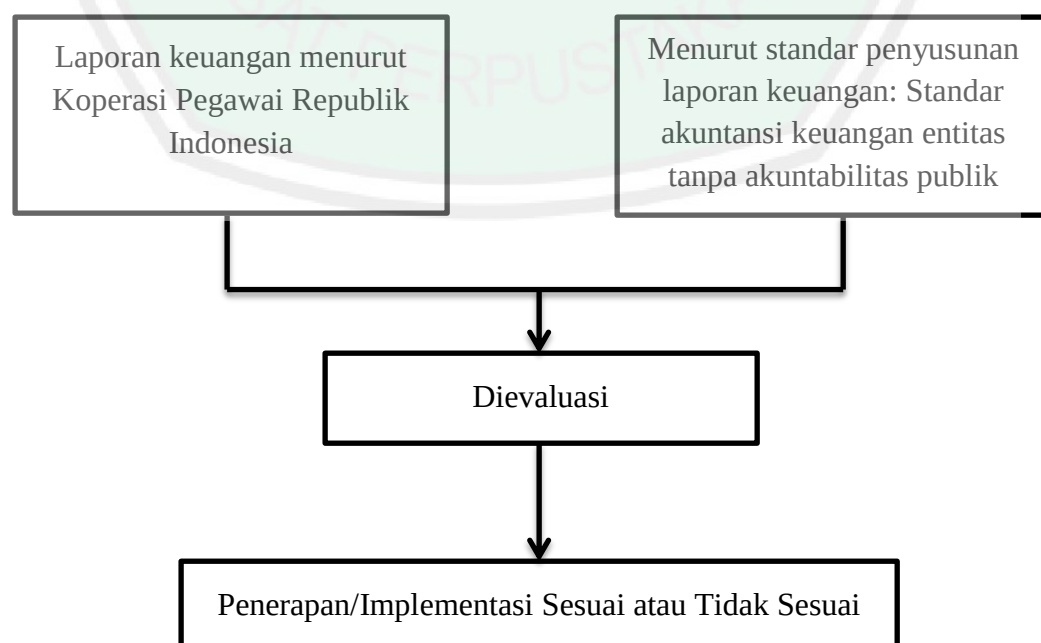
¹ Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I, Pustaka Imam Syafi’I, Bogor, 2004, Hal. 563

pencatatan dapat dijadikan sebagai alat bukti (hitam diatas putih), menggunakan saksi (untuk transaksi yang material) sangat diperlukan karena dikhawatirkan pihak-pihak tertentu mengingkari perjanjian yang telah dibuat. Untuk itulah pembukuan yang disertai penjelasan dan persaksian terhadap semua aktivitas ekonomi keuangan harus berdasarkan surat-surat bukti berupa: faktur, nota, bon kwitansi atau akta notaris untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Dan tentu saja adanya sistem pelaporan yang komprehensif akan memantapkan manajemen karena semua transaksi dapat dikelola dengan baik sehingga terhindar dari kebocoran-kebocoran.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 1

Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur yang beralamatkan di Jalan Raya Bungah - Dukun Nomor 06 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Pemilihan lokasi koperasi tersebut dikarenakan KPRI sudah berdiri lebih dari 30 tahun dan telah memiliki anggota yang berjumlah ratusan dan koperasi telah berbadan hukum resmi. Sehingga mewajibkan koperasi menyusun laporan keuangan yang lebih transparan untuk para anggotanya dan yang sesuai dengan standar yang berlaku bagi koperasi sesuai dengan peraturan dari Peraturan Menteri yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pedoman umum akuntansi koperasi.

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Ghony dan Almanshur (2012:25) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang dan jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep

teori. Jangan sampai sesuatu yang berharga tersebut berlalu bersama waktu tanpa meninggalkan manfaat.

Sedangkan pendekatan yang dipakai berupa deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola data kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Penelitian ini menggambarkan tentang penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur Kecamatan Bungah apakah penerapannya yang dilakukan oleh koperasi sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

3.3 Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah KPRI Suka Makmur Kecamatan Bungah yang telah melakukan pencatatan akuntansi.

Peneliti memilih subyek tersebut dikarenakan ingin mengetahui pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur Kecamatan Bungah apakah telah sesuai dengan standar yang telah berlaku.

3.4 Data dan Jenis Data

Menurut Lungan (2006:13) Data merupakan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang dikumpulkan dari suatu populasi atau bagian populasi yang akan

digunakan untuk menerangkan ciri-ciri populasi yang bersangkutan. Sedangkan Menurut Hasan (2009:16) data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. Dari pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa data merupakan fakta atau keterangan yang dikumpulkan dari suatu populasi untuk menjelaskan karakteristik populasi tersebut.

Menurut sugiyono (2013:402) bila dilihat dari sumber data yang diperoleh maka pengumpulan data dapat menggunakan:

1. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi, dan penyebaran kuisioner. Data primer yang digunakan oleh peneliti adalah berupa sejarah berdirinya instansi, visi dan misi instansi, struktur organisasi instansi, ruang lingkup kegiatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur Kecamatan Bungah dan laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur Kecamatan Bungah .
2. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang diperoleh berupa jurnal-jurnal tentang penelitian yang terkait dengan judul peneliti dan informasi lain yang dibutuhkan tentang penerapan akuntansi pada koperasi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:93) Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah penelitian, karena teknik ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Keberhasilan penelitian sebagian besar bergantung pada teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya. Untuk memperoleh data seperti yang dimaksud itu, dalam penelitian digunakan teknik-teknik, prosedur-prosedur, alat serta kegiatan yang nyata.

Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa :

1. Wawancara
2. Dokumentasi

Wawancara menurut Noor (2011:138) adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur Kecamatan Bungah.

Dokumentasi menurut Margono (2000:18) dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui tulisan, berupa arsip, termasuk buku tentang pendapat, teori, dalil dan lain-lain. Dokumentasi ini berupa data pencatatan yang telah

dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur Kecamatan Bungah.

3.6 Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya dalam penelitian ini yaitu menganalisis data yang diperoleh dari pengumpulan data yang telah dilakukan, baik data primer maupun data sekunder dengan tujuan supaya penelitian ini lebih mudah dibaca, dipahami, dan interpretasikan. Sehingga, dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang berbentuk uraian kata-kata atau kalimat dimana dari kalimat tersebut akan diperoleh suatu kesimpulan dengan melakukan pendekatan, baik secara teoritis maupun pemikiran yang logis untuk memecahkan masalah secara lengkap.

Menurut sugiyono (2013:248) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut miles dan huberman (1984) dalam sugiyono (2013:430), bahwa aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. Reduksi data (*Reduction Data*)
2. Penyajian data (*Display Data*)
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Reduction Data atau mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam tahap ini data yang penulis gunakan diantaranya data tentang koperasi dan catatan akuntansi yang dibuat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur Kecamatan Bungah.

Display Data atau Penyajian data, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi. Dalam penelitian ini data yang disajikan berupa perbandingan penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur Kecamatan Bungah dengan penerapan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (SAK ETAP).

Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Cara yang dilakukan adalah menarik kesimpulan apakah penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia

(KPRI) Suka Makmur Kecamatan Bungah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (SAK ETAP).



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Berdirinya Instansi/Perusahaan

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur Kecamatan Bungah, Sebelumnya bernama KPN Suka Makmur berdiri sekitar tahun 1978 dengan jumlah anggota sebanyak 53 orang yang keseluruhannya adalah guru Sekolah Dasar di wilayah Kecamatan Bungah.

Kantor KPN Suka Makmur pada waktu itu masih mendompleng di Sekolah Dasar Negeri Bungah I, dan baru tahun 1987 dapat membangun dan menempati kantor baru yang berada di Jalan Raya Bungah Dukun No. 06 Bungah sampai sekarang. Satu-satunya usaha yang dijalankan pada saat itu adalah simpan pinjam.

Pengurus yang terpilih untuk mengelola KPN Suka Makmur Bungah pada saat berdirinya adalah:

- Ketua I : Raolan (Alm)
- Ketua II : Moh. Chudlori (Alm)
- Sekretaris I : Djainuri (Alm)
- Sekretaris II : Moh. Arifin
- Bendahara : Maman Yusuf (Alm)

KPN Suka Makmur memperoleh status Badan Hukum pada tahun 1982, tepatnya tanggal 16 Januari 1982 Nomor : 5160/BH/II/82 dan pada tanggal 27 September 1996 mengadakan perubahan AD/ART.

Pengurus KPN Suka Makmur dipilih langsung oleh anggota melalui formatur dalam Rapat Anggota Tahunan, masa bakti pengurus dan badan pemeriksa berdasarkan AD/ART KPN Suka Makmur tahun 1982 dan tahun 1994 adalah 2 tahun. Sedangkan berdasarkan AD/ART yang baru tahun 1996 masa bakti pengurus menjadi 3 tahun, dan nama KPN Suka Makmur diubah menjadi Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur.

Sejak awal berdirinya, anggota KPRI “Suka Makmur” Bungah terdiri dari guru-guru SDN di wilayah Kecamatan Bungah. Untuk menuju koperasi yang lebih maju maka diupayakan pengembangan keanggotaan ke instansi dinas yang ada di wilayah Kecamatan Bungah.

Tahun 1987 guru SMPN Bungah masuk menjadi anggota. Tahun 1989 guru-guru agama dari Departemen Agama ikut masuk menjadi anggota. Tahun 1993 pegawai di lingkungan Instansi Kecamatan Bungah. Kemudian ditahun 1994 pegawai di lingkungan PLKB Kecamatan Bungah berhasil didekati dan ikut menjadi anggota. Sehingga dapat dikatakan hampir semua pegawai Negeri yang ada di lingkungan Kecamatan Bungah masuk menjadi anggota KPRI “Suka Makmur” Kecamatan Bungah.

Sampai tahun 2016, KPRI “Suka Makmur” Kecamatan Bungah telah memiliki anggota sebesar 327 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Daftar Anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Suka Makmur”
Kecamatan Bungah

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Guru dan penjaga SD	113 Orang
2.	Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bungah	12 Orang
3.	Guru SMPN I Bungah	44 Orang
4.	Kantor Kecamatan Bungah	27 Orang
5.	Guru DPK Dinas Pendidikan	15 Orang
7.	Pensiunan	58 Orang
8.	PLKB Kecamatan Bungah	3 Orang
9.	UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Bungah	28 Orang
10.	Guru TK PNS se-Kecamatan Bungah	11 Orang
11.	Lain-lain	16 Orang

Berikut ini adalah susunan kelembagaan KPRI Kecamatan Bungah
 Gresik:

Nama Koperasi : Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Suka
 Makmur” Kecamatan Bungah

Nomor badan Hukum : 5160/BH/II/82

Tanggal Badan Hukum : 16 Januari 1982

NPWP : 01.233.526.1-612.000

TDP : 13.02.2.47.00554

SIUP : 47/437.74/PM/2016

4.1.2 Visi dan Misi Instansi/Perusahaan

1. Visi Instansi/Perusahaan

Terwujudnya KPRI “SUKA MAKMUR” Kecamatan Bungah sebagai Badan Usaha yang Mandiri, Akuntabel, Demokratis berazaskan kekeluargaan.

2. Misi Instansi/Perusahaan

- 1) Meningkatkan kemampuan personil pengurus, pengawas, dan karyawan dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Meningkatkan modal sendiri melalui simpanan anggota.
- 3) Memberikan pelayanan yang prima kepada anggota sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- 4) Mengembangkan usaha sesuai kemampuan dan kondisi lingkungan.
- 5) Melaksanakan rapat anggota tepat pada waktunya.
- 6) Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan dalam rapat anggota.
- 7) Meningkatkan partisipasi aktif semua anggota koperasi.
- 8) Meningkatkan kerjasama antar koperasi dan badan usaha lain.
- 9) Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui layanan koperasi.
- 10) Membantu dan meringankan anggota yang mengalami musibah.

3. Susunan Pengurus, Pengawas, dan Karyawan di Koperasi Pegawai

Republik Indonesia “Suka Makmur” Kecamatan Bungah

Demikian susunan pengurus, pengawas, dan karyawan di koperasi Pegawai Republik Indonesia “Suka Makmur” Kecamatan Bungah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Susunan Pengurus, Pengawas, dan Karyawan di Koperasi Pegawai Republik
Indonesia “Suka Makmur” Kecamatan Bungah

N O	KETERANGAN	NAMA	MASA KERJA	PENDIDIKAN
	Pengurus:			
1.	Ketua I	H. Mat Udi,S.Pd, M.M	2016 – 2018	S2
2.	Ketua II	Drs. Miswadi	2016 – 2018	S1
3.	Sekretaris I	Thohir Mubtada'in,S.Pd	2016 – 2018	S1
4.	Sekretaris II	Kusdarsianto,S.Pd	2016 – 2018	S1
5.	Bendahara	Hj. Sugiarti,S.Pd, M.Pd	2016 – 2018	S2
	Pengawas:			
1.	Pengawas I	Sukarji,S.Pd, M.Pd	2015 – 2016	S2
2.	Pengawas II	Muhibban,S.Pd, I	2015 – 2017	S1
3.	Pengawas III	Puji,S.Pd, M.Pd	2016 – 2018	S2
	Karyawan:			
1.	Kasir	Muh. Masrur	1989	SMEA
2.	Tata Usaha	Miftahul Ulum	2012	SMA
3.	Pertokoan	Mufidatul Ilmiyah	2005	SMA
4.	Penjaga Keamanan	Nafi'in	2015	PAKET C

4.1.3 Struktur Organisasi

Menurut Mulyadi (2001:165) Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian wewenang dan tanggungjawab fungsional kepada masing-masing unit organisasi untuk melaksanakan tugas dan kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggungjawab fungsional dalam sebuah organisasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip, diantaranya:

- Terdapat pemisahan antara fungsi operasional, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi.

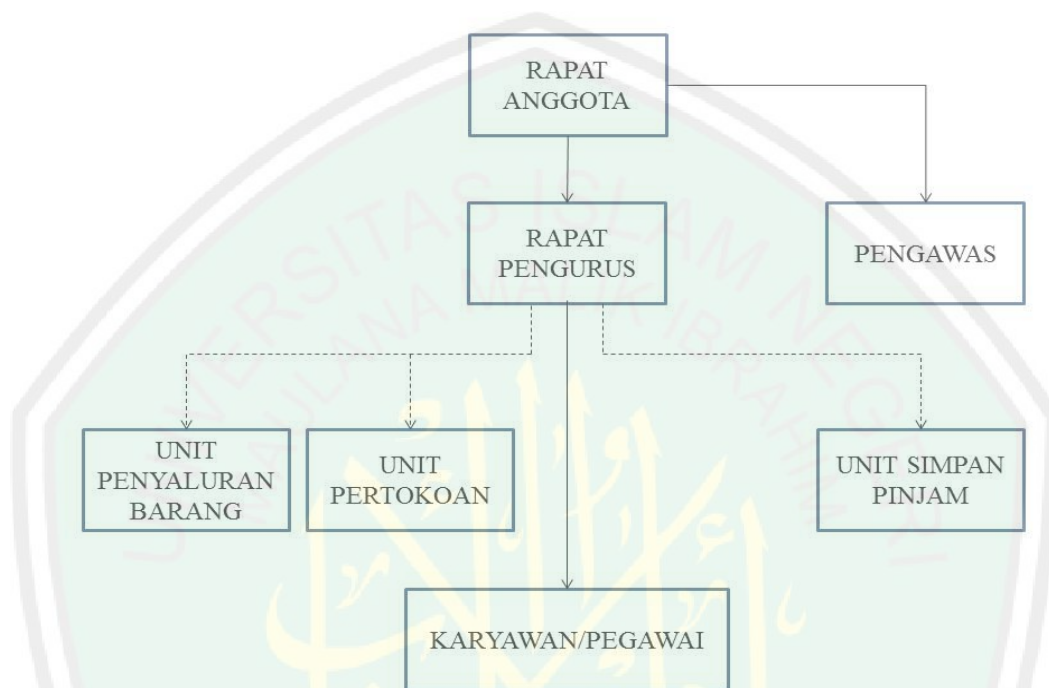
- Sebuah fungsi tidak boleh diberikan tanggungjawab penuh untuk melaksanakan semua kegiatan transaksi atau tidak boleh sampai terjadi perangkapan tugas (*doble job*).

Menurut Krismiaji (2002:46) Sebuah struktur organisasi memberikan gambaran tentang aliran informasi dan pusat pertanggungjawaban. Agar sistem dapat berfungsi dengan baik, maka lingkungan organisasi tersebut harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Organisasi harus menetapkan struktur yang membedakan tugas tiap-tiap unit.
- Organisasi harus memiliki ketentuan yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab manajer masing-masing unit.
- Setiap karyawan menyerahkan laporan pertanggungjawaban langsung kepada manajer masing-masing unit.
- Manajemen puncak harus menetapkan hubungan antara atasan-bawahan secara jelas antar karyawan.

Menurut Djawa (2013:2) *Job description* adalah suatu pernyataan tertulis yang berisi uraian tentang tugas dan wewenang apa saja yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan, bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dan alasan mengapa pekerjaan tersebut dilakukan. Uraian tersebut berisi tentang hubungan antara suatu posisi dengan posisi lainnya di dalam suatu organisasi dan ruang lingkup pekerjaan masing-masing jabatan dengan harapan setiap karyawan dapat memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi dengan adanya uraian jabatan (*job description*) akan membuat pekerjaan dapat berjalan dengan lebih baik dan efektif.

Berikut adalah struktur organisasi KPRI “Suka Makmur” Kecamatan Bungah :



Sumber: KPRI “Suka Makmur” Kecamatan Bungah

GAMBAR 4.1

Struktur Organisasi KPRI “Suka Makmur” Kecamatan Bungah

Adapun tugas dan wewenang masing-masing bagian yaitu :

1. Rapat Anggota

Wewenang rapat anggota adalah hak yang dimiliki oleh rapat anggota untuk memutuskan segala sesuatu sesuai dengan batas ruang lingkup yang telah ditetapkan.

Rapat anggota koperasi mempunyai wewenang untuk menetapkan :

- a. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.

- b. Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus serta pengawas.
- c. Rencana kerja, rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta Pengesahan Laporan Keuangan.
- d. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

2. Rapat Pengurus

Wewenang pengurus adalah hak otoritas yang dimiliki oleh pengurus untuk memutuskan dan menetapkan segala sesuatu yang terkait dengan keberlangsungan usaha koperasi.

1) Ketua I

Ketua I mempunyai wewenang (hak) sebagai berikut :

- a. Mewakili KPRI dimuka dan diluar pengadilan, sebagaimana tersebut pada Bab VII pasal 2 ayat (1) Anggaran Dasar KPRI “Suka Makmur”.
- b. Mewakili KPRI yang berkaitan dengan hubungan masyarakat.
- c. Mewakili KPRI dalam melakukan perjanjian atau persetujuan dengan pihak lain berdasarkan keputusan rapat pengurus dan pengawas.
- d. Mewakili KPRI dalam menjalin hubungan maupun kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan lembaga ekonomi lainnya.
- e. Memimpin rapat pengurus, pengurus dan pengawas, RARK, RAT, dan rapat-rapat lainnya sesuai dengan tata tertib rapat.
- f. Sebagai koordinator teknis dalam menyelesaikan tugas KPRI bidang organisasi, administrasi, usaha, dan permodalan.

- g. Sebagai kuasa KPRI dalam menandatangani surat-surat yang berkaitan KPRI, mengingat pentingnya dapat dilakukan sendiri dan atau KPRI dalam menandatangani surat-surat yang berkaitan KPRI, mengingat pentingnya dapat dilakukan sendiri dan atau bersama-sama Sekretaris atau Bendahara.
- h. Sebagai wakil KPRI dalam melakukan kerjasama dengan PKPRI, atau pihak lain bidang pertokoan, konsumsi, dan bidang lainnya.
- i. Sebagai kuasa KPRI dalam mengusahakan berdirinya unit usaha baru.
- j. Sebagai koordinator teknis pembinaan anggota pensiunan, Puskesmas, dan Kantor Kecamatan Bungah.

2) Ketua II

Ketua II mempunyai wewenang (hak) sebagai berikut :

- a. Sebagai kuasa KPRI dalam menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan KPRI, mengingat pentingnya dapat dilakukan sendiri dan atau bersama-sama dengan Sekretaris atau Bendahara, apabila Ketua I berhalangan atau memberikan kuasa.
- b. Sebagai kuasa KPRI yang berkaitan dengan karyawan termasuk kesejahteraannya.
- c. Meneliti pelaksanaan Rencana Kerja dan Keputusan Rapat Anggota.
- d. Mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, penataran, dan pengkaderan anggota.
- e. Mengkoordinir penyelesaian tunggakan piutang merah, termasuk anggota yang meninggal dunia.
- f. Memimpin unit pertokoan.

- g. Menyusun rencana kerja bersama Sekretaris II atas dasar keputusan rapat pengurus dan pengawas.
- h. membantu bendahara mengurus masalah yang berhubungan dengan perpajakan.
- i. Mewakili tugas-tugas Ketua I, apabila Ketua I berhalangan melaksanakan tugasnya.
- j. Sebagai koordinator teknis pembinaan anggota yang berada di unit kerja Kantor UPTD Pendidikan, SDN Sidomukti, SDN Mojopurogede, SDN Mojopurowetan, SDN Melirang, SDN Sidomukti, dan Instansi lain-lain.

3) Sekretaris I

Sekretaris I mempunyai wewenang (hak) sebagai berikut :

- a. Mengusahakan tertib administrasi KPRI, termasuk statistik dan buku-buku kelengkapan organisasi, bersama Sekretaris II.
- b. Bersama Ketua I atau Ketua II menandatangani surat-surat yang menyangkut KPRI.
- c. Bersama Bendahara menyusun Rencana Anggaran dan Belanja KPRI.
- d. Mengatur persiapan rapat pengurus, pengawas, RARK, RAT, Rapat Pembinaan, dan rapat-rapat lainnya.
- e. Menyusun dan mengamankan dokumen KPRI.
- f. Bersama Ketua II mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, penataran, dan pengkaderan anggota.
- g. Bersama sekretaris II merencanakan pembinaan koperasi sekolah.

- h. Bersama bendahara membuat laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan.
- i. Memimpin Unit Simpan Pinjam (USP).
- j. Sebagai koordinator teknis pembinaan anggota yang berada di unit kerja SDN Indrodelik, Abar-abir, Kemangi, Sungonlegowo I, Sungonlegowo II dan Pegundan.

4) Sekretaris II

Sekretaris II mempunyai wewenang (hak) sebagai berikut :

- a. Mengusahakan tertibnya buku-buku kelengkapan organisasi dan mengatur kearsipan.
- b. Bersama Sekretaris I mengatur persiapan dan pelaksanaan rapat pengurus, pengawas, RARK, RAT, Rapat Pembinaan, dan rapat-rapat lainnya.
- c. Membuat undangan dan notula rapat.
- d. Menghimpun peraturan perkoperasian, buku-buku, majalah, buletin, koran, dan lain-lain untuk bahan pustaka.
- e. Menghimpun dan menyusun data KPRI.
- f. Menyiapkan dan mengisi blanko tagihan kepada anggota setiap bulan bagi anggota yang tidak memenuhi kewajibannya.
- g. Melakukan pengawasan dan perawatan kantor KPRI beserta inventarisnya.
- h. Bersama Sekretaris I merencanakan teknis pembinaan koperasi sekolah / koperasi siswa.
- i. Bersama Ketua II menyusun Rencana Kerja KPRI atas dasar keputusan rapat pengurus dan Pengawas.

- j. Memimpin unit usaha penyaluran barang.
- k. Sebagai koordinator teknis pembinaan anggota yang berada di unit kerja SDN Bungah, Sukorejo, Bedanten, Tanjungwedoro, Watuagung dan Kramat.

5) Bendahara

Bendahara mempunyai wewenang (hak) sebagai berikut :

- a. Bersama Sekretaris II menyiapkan dan mengisi blanko tagihan kepada anggota setiap bulan bagi anggota yang tidak memenuhi kewajibannya.
- b. Sebagai kuasa KPRI dalam mengatur tertibnya pembukuan keuangan.
- c. Bersama Sekretaris I menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja KPRI.
- d. Membuat laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan.
- e. Bersama Ketua II menyelesaikan tunggakan piutang merah.
- f. Bersama Ketua I melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja KPRI.
- g. Bersama Ketua II menyelesaikan masalah perpajakan.
- h. Menghimpun data dan arsip yang berhubungan dengan keuangan.
- i. Menyiapkan data atau informasi keuangan untuk bahan rapat rutin.
- j. Memimpin unit usaha penyaluran sepeda motor.
- k. Sebagai koordinator teknis pembinaan anggota yang berada di unit kerja SMPN 1 Bungah, SDN Sidorejo, SDN Masangan dan SDN Sukowati.

3. Pengawas

Wewenang pengawas adalah hak yang dimiliki oleh pengawas untuk memantau kinerja dari pengurus serta memantau kegiatan operasional koperasi.

Pengawas mempunyai wewenang (hak) sebagai berikut :

- a. Pengendalian, yaitu ikut serta dalam proses pengambilan keputusan rapat-rapat bersama pengurus yang dihadiri secara periodik.
- b. Pengawasan dan pelaksanaan kegiatan pengurus secara periodik maupun insidental.
- c. Aktivitas pemeriksaan kas opname tiap bulan, pemeriksaan tiap 3 bulan, pemeriksaan umum tiap akhir tahun.
- d. Membuat laporan hasil pemeriksaan setiap tiga bulan dan setiap akhir tahun.

4. Karyawan/Pegawai

Tugas karyawan/pegawai adalah berkewajiban untuk menjalankan kegiatan operasional koperasi pada setiap jam kerja koperasi sedang berlangsung.

1) Kasir

Kasir mempunyai wewenang (hak) sebagai berikut :

- a. Mengerjakan bagian peminjaman meliputi:
 1. Melakukan pembayaran kepada anggota yang mengajukan pinjaman uang atau barang dan telah mendapat rekomendasi pengurus.
 2. Menerima angsuran anggota.
 3. Membuat bukti-bukti pembayaran dan penerimaan uang (kas masuk/keluar)

- b. Membuat daftar tagihan.
- c. Melakukan penagihan kepada anggota.
- d. Membuat laporan kas harian (setiap akhir bulan).
- e. Membuat jurnal harian (setiap akhir bulan).
- f. Melakukan pembayaran kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama dengan KPRI “Suka Makmur”.
- g. Membuat rincian Uang kehormatan, insentif, uang sidang, konsumsi pengurus/pegawai dan gaji karyawan beserta bukti penerimaannya.
- h. Menyimpan dan mengamankan keuangan KPRI “Suka Makmur”.
- i. Membantu mengurus menyiapkan rapat pengurus/pengawas dalam bidang keuangan.
- j. Membantu pengurus membuat laporan keuangan.
- k. Membayar pajak.
- l. Melaporkan hasil kerjanya kepada pengurus dalam rapat akhir bulan.

2) Tata Usaha

Tata Usaha mempunyai wewenang (hak) sebagai berikut :

- a. Mengerjakan bidang administrasi meliputi :
 1. Mendokumentasikan peraturan-peraturan yang ada di KPRI “Suka Makmur”.
 2. Mendokumentasikan buku notula rapat anggota, keputusan rapat anggota, notula rapat pengurus, keputusan rapat pengurus, notula rapat pengawas, keputusan rapat pengawas.

3. Mendokumentasikan buku tamu, saran anggota, catatan kejadian penting, anjuran pejabat, saran pengawas.
 4. Mengerjakan dan mendokumentasikan buku daftar anggota, pengurus, pengawas, karyawan, inventaris, agenda, dan ekspidisi.
- b. Membuat laporan simpanan anggota (setiap akhir bulan) meliputi :
1. Simpanan pokok.
 2. Simpanan wajib.
 3. Simpanan wajib pinjam.
 4. Simpanan mana suka.
 5. Tabungan.
 6. Tabungan hari raya.
 7. Penanaman modal.
- c. Membuat bukti kas masuk dan bukti kas keluar.
- d. Mengerjakan dan mendokumentasikan buku penjualan barang konsinyasi dan sepeda motor.
- e. Mengantarkan surat-surat.
- f. Membantu penagihan pertokoan.
- g. Membantu pengurus menyiapkan rapat pengurus/pengawas dalam bidang administrasi.
- h. Menginventarisir pengajuan pinjaman uang/barang dari anggota dan pihak lain.
- i. Menginventarisir surat perjanjian pinjaman anggota dan pihak lain.
- j. Melaporkan hasil kerjanya kepada pengurus dalam rapat akhir bulan.

3) Pertokoan

Pertokoan mempunyai wewenang (hak) sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab bidang pertokoan, meliputi :
 1. menginventarisir barang-barang pertokoan.
 2. Mengerjakan dan mendokumentasikan buku pembelian dan bukti-bukti pembelian.
 3. Mengerjakan dan mendokumentasikan buku penjualan dan bukti-bukti penjualan.
 4. Mengerjakan dan mendokumentasikan buku persediaan.
 5. Membuat tagihan kepada anggota.
 6. Membuat perhitungan laba rugi pertokoan (setiap akhir bulan).
- b. Menyiapkan tempat, konsumsi, rapat pengurus/pengawas.
- c. Menata dan menyimpan alat-alat rumah tangga KPRI “Suka Makmur”.
- d. Membantu mengurus menyiapkan rapat pengurus/pengawas dalam bidang pertokoan.
- e. Melaporkan hasil kerjanya kepada pengurus dalam rapat akhir bulan.

4) Penjaga Keamanan

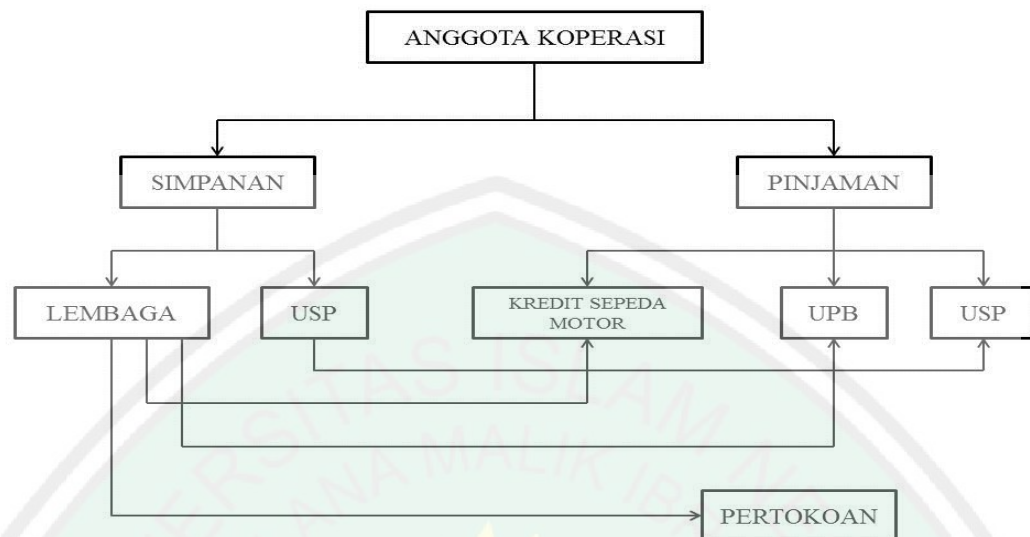
Penjaga Keamanan mempunyai wewenang (hak) sebagai berikut :

- a. Menjaga keamanan KPRI “Suka Makmur” terutama malam hari.
- b. Bertanggungjawab atas kebersihan ruangan dan kantor KPRI “Suka Makmur”.
- c. Membersihkan ruangan dan lingkungan kantor KPRI “Suka Makmur” setiap pagi hari.
- d. Membantu bidang pertokoan.

- e. Membantu bidang penataan ruangan.
- f. Membantu mengantarkan surat-surat.
- g. Membantu karyawan lain bila diperlukan.
- h. Melaporkan hasil kerjanya pada pengurus dalam rapat akhir bulan.

4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan/Usaha Dari Instansi

Dalam kehidupan koperasi kegiatan simpan pinjam mempunyai maksud tersendiri yaitu diharapkan sebelum dan sesudah terjadinya transaksi, anggota menyimpan lebih dulu baru kemudian meminjam dan transaksi pinjam meminjam uang dari dan untuk anggota tidak selesai atau terputuskan dengan dilunasinya pinjaman. Dengan demikian dalam usaha simpan pinjam di koperasi, idealnya yang diputar sebagai pinjaman adalah tabungan atau simpanan anggota. Jadi partisipasi anggota dalam menyimpan dan meminjam sangat dianjurkan, karena kepada anggota masih ada kontribusi yang diberikan dari koperasi yakni SHU bagian anggota yang berdasarkan transaksi diusaha simpan pinjam koperasi.



Sumber: KPRI “Suka Makmur” Kecamatan Bungah

GAMBAR 4.2
TRANSAKSI KEGIATAN USAHA KPRI “SUKA MAKMUR”

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur Kecamatan Bungah terdiri dari beberapa kegiatan usaha yang dijalankan, kegiatan-kegiatan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. SIMPANAN

Simpanan koperasi merupakan dana yang dihimpun dari para anggota KPRI Suka Makmur Kecamatan Bungah. Simpanan pada KPRI “Suka Makmur” dihimpun dari seluruh anggota koperasi. Ada 2 jenis simpanan yaitu simpanan pada lembaga dan simpanan pada USP. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1) Simpanan Pada Lembaga

Terdiri dari simpanan wajib dan simpanan pokok, yaitu merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perorangan untuk menjadi anggota koperasi

dan berhak memanfaatkan atau menerima manfaat yang diberikan oleh pihak koperasi.

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok yaitu merupakan sejumlah uang yang harus dibayar oleh setiap anggota sama besarnya pada waktu yang bersangkutan diterima menjadi anggota. Dan hanya dibayarkan sekali selama menjadi anggota yakni sebesar Rp. 110.000,00. Simpanan itu tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib yaitu simpanan yang wajib dibayarkan oleh anggota setiap bulannya. Simpanan wajib yang harus dibayarkan yakni sebesar Rp. 100.000,00. Anggota yang tidak membayar simpanan wajib melebihi 3 bulan dalam 1 tahun maka dinyatakan sebagai anggota non aktif dalam satu tahun yang bersangkutan. Simpanan wajib tidak dapat ditarik selama anggota belum keluar dari koperasi tersebut.

2) Simpanan Pada Unit Simpan Pinjam

Dalam simpanan unit pinjam memiliki 4 kegiatan simpanan yang masing-masing akan dijelaskan lebih terperinci sebagai berikut:

a. Simpanan Wajib Pinjam

Simpanan wajib pinjam ini dibayar jika anggota tersebut meminjam. Besarnya pinjaman tergantung jumlah pinjaman yang diajukan oleh anggota.

b. Simpanan Mana Suka

Simpanan mana suka dibayar setiap bulan dan jumlahnya sebesar Rp. 5.000,00 perbulan.

c. Simpanan Khusus

Simpanan khusus dibayar setiap bulan dan jumlahnya sebesar Rp. 1.000,00 perbulan.

d. Tabungan Hari Raya

Tabungan hari raya dibayarkan setiap bulan dan akan dikembalikan menjelang hari raya dan ditambah 5 % dari total simpanan. Besarnya tabungan hari raya yakni Rp. 150.000,00 dan Rp. 250.000,00 perbulan.

2. PINJAMAN

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak anggota yang lain mewajibkan pihak lain untuk melunasi kewajiban atau hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan pembayaran sejumlah imbalan yang telah disepakati bersama. Pinjaman dapat dipersamakan dengan kredit.

Dalam memberikan pinjaman KSP dan USP wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat (*prudential*) dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.

Agar KSP atau USP dapat berjalan lancar dan tidak terjadi tunggakan yang mengakibatkan kerumitan usaha simpan pinjam dikemudian hari, maka sebelum realisasi atau pencairan kredit perlu diadakan kajian terhadap calon peminjam yang membutuhkan pinjaman.

Sesuai dengan perjanjian kredit anggota harus berstatus PNS dan menjadi anggota koperasi. Jaminan yang diberikan oleh anggota yang meminjam yakni gaji PNS yang dibayarkan oleh juru bayar gaji masing-masing instansi.

Ketentuan umum atau persyaratan pengajuan kredit pada KPRI “Suka Makmur” Kecamatan Bungah antara lain :

- a. Mengisi formulir surat permohonan kredit (SPK).
- b. Mengisi SPK yang disediakan oleh koperasi.
- c. Formulir SPK terdiri dari 2 bagian :
- d. Bagian pertama harus diisi dan ditanda tangani oleh pemohon, atasan langsung, dan juru bayar gaji.
- e. Bagian kedua harus diisi dan ditanda tangani oleh pemohon dan pimpinan unit usaha (USP/UPB).
- f. Atasan langsung, juru bayar gaji, maupun ahli waris dapat memberikan catatan yang diperlukan pada formulir diri atau KTP yang masih berlaku.

Urutan alur kerja dari pengajuan pinjaman hingga pelunasan sebagai berikut :

1. Anggota mengisi formulir pinjaman diketahui oleh juru bayar dan kepala instansi anggota petugas.
2. Menyerahkan formulir ke koperasi.
3. Pengajuan pinjaman anggota dibahas dalam rapat akhir bulan untuk direkomendasikan atau ditolak.
4. Transaksi pinjaman oleh kasir.
5. Pembayaran rutin angsuran pinjaman tiap bulan.

Ada beberapa macam jenis kredit yang disalurkan oleh KPRI “Suka Makmur” Kecamatan Bungah, yaitu :

1. Kredit USP

- a. Kredit USP maksimal Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) bagi anggota aktif dan maksimal Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) bagi anggota pensiunan.
- b. Jangka waktu pembayaran maksimal 72 bulan / 6 tahun bagi anggota yang aktif dan 36 bulan / 3 tahun bagi anggota yang pensiunan.
- c. Jika masa kerja sebagai PNS dari 6 tahun, dan yang bersangkutan mengajukan permohonan kredit maka akan ditentukan melalui rapat pengurus dan pengawas.
- d. Suku bunga ditetapkan sesuai keputusan rapat anggota yakni sebesar 1,2%.
- e. Pada saat penerimaan, kredit yang bersangkutan dikenakan biaya provisi kredit 1% dana tanggung renteng 0,5% dan SWP 1,5% dari jumlah kredit.
- f. Bagi anggota yang mengajukan kredit, tetapi pinjaman yang lama belum lunas diharuskan melunasi pinjamannya terlebih dahulu.
- g. Pelunasan pinjaman angsuran ke 6 atau lebih, jasa ditetapkan 10% dari kumulatif jasa sisa pinjaman.
- h. Pelunasan 5 kali angsuran kebawah, jasa berlaku seperti ketentuan huruf D.
- i. Pinjaman baru setelah melunasi, berlaku seperti huruf F.

2. Kredit UPB

- a. Kredit UPB maksimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- b. Jangka waktu pembayaran maksimal 24 bulan.
- c. Besarnya jasa setiap bulan ditetapkan 1,5%.

3. Kredit UPB/Sepeda Motor

- a. Kredit sepeda motor maksimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- b. Apabila harga sepeda motor melebihi ketentuan seperti pada huruf A, maka selebihnya harus dibayar oleh yang bersangkutan sebagai uang muka.
- c. Membayar biaya administrasi sebesar 2% dari pokok pinjaman.
- d. Jangka waktu maksimal 48 bulan / 4 tahun angsuran.
- e. Jasa pinjaman ditetapkan 1,1% perbulan dari pokok pinjaman.
- f. Bagi anggota yang melunasi sisa pinjaman dikenakan jasa 10% dari kumulatif sisa jasa yang belum dibayar.
- g. Pelunasan 10 kali angsuran kebawah, jasa berlaku seperti huruf E.

3. UNIT USAHA PERTOKOAN KPRI SUKA MAKMUR

Unit usaha pertokoan menyediakan barang-barang dagang yang dijual pada anggota koperasi maupun bukan anggota koperasi. Barang dagang yang disediakan meliputi barang kebutuhan sehari-hari, furniture dll.

Karyawan yang menangani unit usaha pertokoan adalah bagian pertokoan. Persediaan barang dagang disuplai oleh distributor setelah adanya order barang

yang dilakukan oleh bagian pertokoan. Sedangkan sistem penjualan barang pembayarannya dilakukan dengan cara tunai maupun kredit.

Untuk meningkatkan pendapatan toko KPRI “Suka Makmur” memberikan kartu belanja senilai Rp. 25.000 per bulan dan harus dibelanjakan di toko KPRI “Suka Makmur”. Kartu belanja tersebut sebagai stimulan untuk merangsang anggota melakukan kegiatan belanja di toko. Kartu belanja tersebut dibuat setiap akhir bulan dan disampaikan pada masing-masing instansi sesuai dengan daftar anggota yang terdaftar. Jumlah nominal kartu belanja dituangkan oleh juru bayar masing-masing instansi melalui potongan gaji setiap bulannya.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Laporan keuangan adalah laporan hasil akhir dari kegiatan usaha dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan dibuat bertujuan untuk mengetahui keadaan keuangan dan kondisi perusahaan. Selain itu laporan keuangan juga dapat sebagai dasar untuk menentukan kebijakan-kebijakan di tahun mendatang.

Dalam penyusunan laporan keuangan tentu terdapat standar untuk penyusunannya. Dasar ini digunakan agar seluruh laporan keuangan perusahaan sama dan dapat dimengerti. Dasar penyusunan untuk laporan keuangan koperasi terdapat standar baru sebagai pengganti PSAK no 27. Yaitu standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik atau yang disebut SAK-ETAP.

Dalam SAK ETAP disebutkan bahwa laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

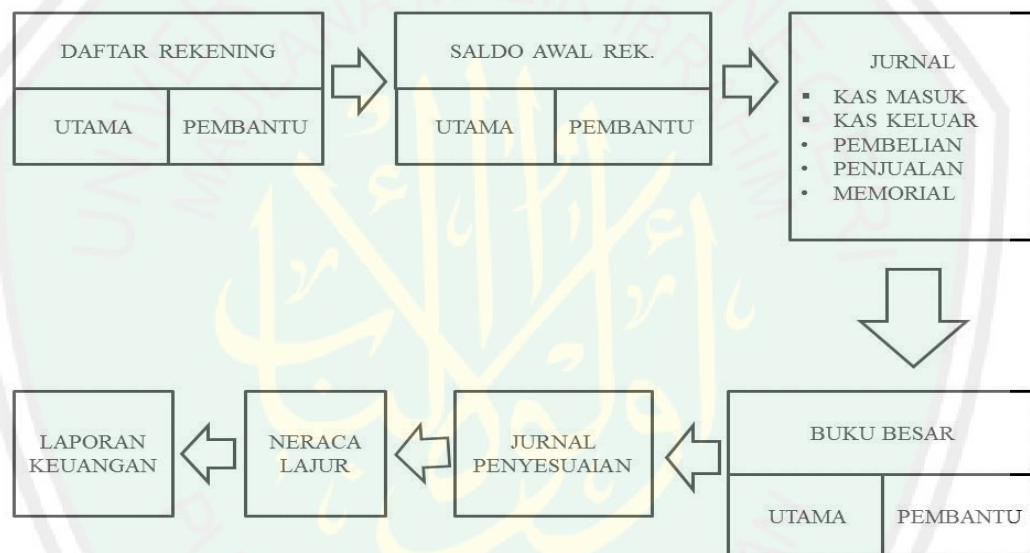
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah yang berdiri pada tahun 1982 menjalankan kegiatan usahanya dengan mengumpulkan dana dari seluruh anggota koperasi dalam bentuk tabungan maupun investasi berjangka untuk kembali didistribusikan kepada anggota yang membutuhkan dana pinjaman. Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah memiliki akuntabilitas publik yang signifikan karena juga belum mendaftarkan diri sebagai perusahaan publik. Sehingga koperasi hanya bertanggung jawab atas dana anggota-anggotanya.

Dalam kegiatan transaksi keuangan yang terjadi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah telah dikerjakan sesuai dengan prosedur yang disarankan PKP RI Kabupaten Gresik selaku induk dari KPRI yang berada dalam naungan Kabupaten Gresik.

Sehingga dalam kesehariannya proses pencatatan sistem akuntansi yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah adalah sebagai berikut ini:

1. Setiap transaksi keuangan yang terjadi langsung dikerjakan pertama kali oleh pihak kasir dan kemudian dibuatkan bukti pembayaran atau bukti penerimaan dan kemudian dimasukkan ke dalam jurnal kas harian.
2. Bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas tersebut oleh kasir disampaikan kepada juru buku yang kemudian dibuatkan bukti kas masuk dan bukti kas keluar sesuai dengan bukti-bukti transaksi keuangan yang terjadi di KPRI Suka Makmur Kecamatan Bungah.

3. Bukti mengenai kas yang keluar dan bukti kas yang masuk selanjutnya akan ditandatangani oleh kasir dan juru buku dan diketahui oleh bendahara KPRI Suka Makmur Kecamatan Bungah.
4. Selanjutnya oleh juru buku, bukti mengenai kas masuk dan bukti mengenai kas yang keluar tersebut kemudian diinput kedalam jurnal kas masuk (JKM) dan jurnal kas keluar (JKK).



Sumber: KPRI "Suka Makmur" Kecamatan Bungah

GAMBAR 4.3

SIKLUS PENCATATAN TRANSAKSI KPRI "SUKA MAKMUR"

Sebagai salah satu koperasi yang cukup maju dan berada di bawah PKP RI Gresik. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Suka Makmur" Kecamatan Bungah selalu melakukan pencatatan atas transaksi keuangan yang terjadi secara rutin. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Suka Makmur" Kecamatan Bungah telah membuat laporan keuangan yang dibutuhkan

untuk melihat posisi keuangan dan sisa hasil usaha koperasi selama periode tertentu.

Menurut Drs. Miswadi selaku ketua II yang ada di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah menyatakan bahwa :

“dalam menjalankan operasi kegiatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Suka Makmur Kecamatan Bungah ini kita selalu melakukan pencatatan secara rutin dalam setiap bulannya yang kemudian dibubukan berupa laporan keuangan yang selalu tertera dalam Rapat Anggota Tahunan dalam setiap tahunnya, dan koperasi memiliki lebih dari satu unit usaha yang dijalankan yang masing-masing unit telah mempunyai seseorang yang bertanggungjawab dalam menjalankannya yang kemudian akan melaporkannya kepada bendahara untuk kemudian di buat laporan secara keseluruhan”.

Laporan keuangan yang ada di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah disusun oleh seorang bendahara dan dibantu oleh masing-masing unit usaha yang ada didalam koperasi, laporan keuangan tersebut digunakan untuk melihat posisi keuangan berupa jumlah kas yang masuk dan kas yang keluar dari koperasi, serta mengontrol pengeluaran apa saja yang perlu dilakukan oleh koperasi.

Dalam SAK ETAP laporan keuangan yang lengkap yaitu meliputi : neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang berisikan tentang ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan penjelasan lainnya. Sedangkan dalam Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah yang disajikan dalam laporan keuangan yang ada hanyalah neraca, laporan laba rugi atau yang dalam

koperasi lebih dikenal dengan laporan sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

Menurut Hj. Sugiarti selaku bendara di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah menyatakan bahwa :

“ dalam melakukan pencatatan untuk menyusun laporan keuangan koperasi selama ini hanya secara manual, belum menggunakan software akuntansi, sehingga pencatatannya dilakukan secara manual dengan menggunakan microsoft office. Sedangkan komponen laporan keuangan yang disajikan dalam RAT setiap tahunnya adalah neraca, laporan sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas”.

Menurut Drs. Miswadi selaku ketua II yang ada di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah menyatakan bahwa :

“tujuan kami membuat laporan keuangan adalah untuk mengetahui kinerja koperasi dan juga sebagai catatan sumber informasi keuangan koperasi. Selain itu juga untuk pertanggung jawaban kepada para anggota yang bergabung dalam koperasi ketika sedang terlaksananya RAT”.

Berdasarkan hasil penelitian, laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah terdiri dari laporan neraca, laporan sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Dalam SAK ETAP ada beberapa ketentuan yang dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah. Adanya pemisahan aset kedalam asset lancar dan asset tidak lancar dan kewajiban kedalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca, pengakuan biaya yang merupakan akibat langsung dari pengakuan asset dan kewajiban dalam laporan

laba rugi dan laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah menunjukkan asset lancar dan asset tetap dicatat terpisah begitu juga dengan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Asset lancar sebesar Rp. 3.389.603.369 asset tidak lancar sebesar Rp. 354.105.117 asset tetap Rp. 202.293.017 sehingga total asset sebesar Rp. 3.946.001.503. kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 375.317.248 dan jumlah ekuitas sebesar Rp. 3.570.684.255 sehingga total kewajiban sebesar Rp. 3.946.001.503.

Laporan sisa hasil usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah menunjukkan pemisahan biaya ke dalam empat biaya yaitu biaya organisasi dan pembinaan, biaya operasional, biaya umum dan administrasi, dan biaya penyusutan. Jumlah pendapatan koperasi pada tahun 2016 sebesar Rp. 291.105.569 jumlah biaya organisasi dan pembinaan sebesar Rp. 30.628.491 jumlah biaya operasional sebesar Rp. 18.247.164 jumlah biaya umum dan administrasi sebesar Rp. 76.079.567 dan jumlah beban penyusutan sebesar Rp. 22.481.262 sehingga jumlah seluruh biaya tahun 2016 sebesar 147.436.484. dari selisih pendapatan dan biaya menghasilkan sisa hasil usaha sebesar 143.669.085.

Laporan perubahan ekuitas Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah menunjukkan jumlah ekuitas tahun 2015 sebesar Rp. 3.174.880.562 kenaikan ekuitas sebesar Rp. 547.251.594 serta

pengurangan SHU tahun lalu Rp. 151.447.901 sehingga jumlah ekuitas akhir tahun 2016 sebesar 3.570.684.255.

Laporan arus kas Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah menunjukkan jumlah sisa hasil usaha Rp. 143.669.085 penyesuaian dasar kas sebesar Rp. (516.635.829) finansial sebesar Rp. 403.582.509 penggunaan kas sebesar Rp. 185.051.701 penurunan kas atau setara kas sebesar Rp. 154.435.936 saldo kas awal tahun 2016 sebesar Rp. 513.854.105 sehingga jumlah kas akhir tahun 2016 sebesar Rp. 359.418.169.

4.2.1 Penyusunan Laporan Keuangan KPRI “Suka Makmur” Kecamatan Bungah

Laporan keuangan yang ada pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam pembahasan sebagai berikut.

4.2.1.1 Neraca

Neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan posisi aktiva, pasiva, dan modal. Pada neraca yang mengacu pada SAK ETAP neraca terdiri dari asset, liabilitas, dan ekuitas. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penyusunan neraca. Dalam paragraf 2.33 SAK ETAP diatur bahwa entitas harus menyusun laporan keuangan kecuali Laporan Arus Kas dengan menggunakan dasar akrual. Dalam paragraf yang sama SAK ETAP menambahkan bahwa dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai asset,

kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut (SAK ETAP,2009:12).

SAK ETAP menyebutkan lebih lanjut dalam paragraf 4.1 bahwa Neraca menyajikan asset, kewajiban dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu yaitu akhir periode pelaporan (SAK ETAP,2009:19). Penyajian neraca tersebut minimal harus mencakup pos-pos mengenai kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, asset tetap, asset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, asset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi dan ekuitas.

Neraca Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah terdiri dari:

1. Asset

Asset adalah sumber ekonomis dari suatu usaha yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi usaha tersebut dimasa yang akan datang. Aktiva dalam neraca menunjukkan jumlah harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan selama satu periode akuntansi. SAK ETAP dalam paragraf 4.5 menyebutkan bahwa entitas harus menyajikan asset lancar dan asset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditasnya memberikan informasi yang andal dan relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan maka semua asset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya (SAK ETAP,2009:19). Berdasarkan pada definisi tersebut maka

terdapat informasi yang tersirat bahwa terdapat fleksibilitas yang diatur di dalam SAK ETAP mengenai bentuk penyajian asset dan kewajiban.

Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah menyajikan asset di dalam neraca berdasarkan likuiditasnya pos asset, yaitu asset lancar, asset tidak lancar dan asset tetap. Hal ini dirasa lebih informatif bagi para pengguna laporan keuangan. Terutama bagi para anggota koperasi yang nantinya akan mengikuti Rapat Akhir Tahunan (RAT) yang diselenggarakan oleh pengurus dan pengawas koperasi. Hal itu dapat dilihat sebagai berikut:

- Asset lancar terdiri dari kas, bank, dan piutang. Akun kas bank dibedakan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah karena tingkat likuiditas akun kas lebih cepat dari pada Bank. Namun dalam akun bank tidak dijelaskan secara terperinci tentang bank yang digunakan oleh KPRI “Suka Makmur” Kecamatan Bungah.
- Akun piutang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah dibedakan menjadi piutang barang yang diperoleh dari penjualan barang yang ada di unit pertokoan, piutang sepeda motor yang diperoleh dari jasa kredit sepeda motor, barang dagangan (tanah) diperoleh dari pemberian jasa penjualan tanah, piutang di USP/Modal di USP dari para anggota yang melakukan pinjaman di USP maupun tabungan dari anggota, dan pendapatan yang masih harus diterima.
- Asset tetap yang ada pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah terdiri dari akun tanah, bangunan

Gedung/Kantor, dan inventaris. Akun inventaris tersebut terdiri dari ATK, bangku, kursi, komputer, printer, kipas angin dll. Namun karena tidak dijelaskan secara terperinci oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah maka nominal masing-masing inventaris disajikan menjadi satu akun. Sedangkan bangunan gedung/kantor diperoleh dari hasil pembelian koperasi itu sendiri dan digunakan untuk operasional koperasi.

Pada kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah pencatatan transaksi yang dilakukan yaitu pencatatan transaksi berdasarkan akrual basis yaitu pencatatan dilakukan ketika terjadi transaksi walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan oleh koperasi.

Pada umumnya pengakuan aset dilakukan bersamaan dengan adanya transaksi, kejadian, atau keadaan yang mempengaruhi suatu aset. Disamping memenuhi definisi aset kriteria keterukuran, keterpautan, dan keterandalan harus dipenuhi pula. Hal ini juga dilakukan oleh KPRI “Suka Makmur” Kecamatan Bungah dalam melakukan pengakuan pada aset yang dimiliki oleh koperasi. Pengakuan aset yang dilakukan oleh KPRI “Suka Makmur” Kecamatan Bungah yaitu ketika ada transaksi yang sedang terjadi, objek yang ada juga merupakan sumber ekonomi yang dibutuhkan dan berharga, koperasi juga mengendalikan dan memiliki objek aset, dan objek yang dimiliki oleh koperasi mempunyai manfaat yang terukur secara moneter.

Karena asset merupakan elemen pembentuk posisi keuangan sebagai informasi semantik bagi investor dan kreditor, maka tujuan penilaian asset harus berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan. Tujuan dari penilaian asset adalah merepresentasikan atribut pos-pos asset yang berpaut dengan tujuan pelaporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah dasar penilaian asset yang digunakan adalah harga perolehannya atau menggunakan metode biaya historis (*Historical Cost*).

Sedangkan dalam penyajian asset yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah adalah asset disajikan di sisi debit atau kiri dalam neraca berformat akun dan dibagian atas dalam neraca berformat laporan, asset juga telah diklasifikasikan sebagai asset lancar dan asset tetap, penyajian asset juga telah diurutkan sesuai dengan tingkat likuiditasnya atau kelancarannya yaitu yang paling lancar dicantumkan pada urutan pertama.

a. Kas

Kas adalah harta berupa uang tunai yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang sedang dijalankan. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah. Kas pada neraca digolongkan menjadi kas berupa uang tunai dan kas berupa simpanan-simpanan yang terdapat pada bank.

Kas yang disimpan sebagai tabungan pada bank dilakukan karena penyimpanan kas pada bank dianggap lebih aman. Namun penyimpanan yang

dilakukan di dalam bank tidak dijelaskan secara spesifik oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah.

Jumlah kas yang dimiliki oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah pada tahun 2016 dicatat dengan jumlah kas sebesar Rp. 6,252,744 dan pada bank dicatat dengan jumlah sebesar Rp. 353,165,425. Pencatatan kas tersebut telah sesuai dengan SAK ETAP karena pencatatan dilakukan sesuai dengan akrual basis dan telah diklasifikasikan sesuai dengan tingkat likuiditasnya.

b. Piutang

Piutang yaitu aktiva yang timbul karena perusahaan menjual barangnya atau memberikan jasanya kepada para pelanggan dengan cara kredit atau perjanjian pembayaran dikemudian hari.

Pencatatan piutang yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah pada laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi piutang barang, piutang sepeda motor, barang dagangan (tanah), piutang di USP/Modal di USP dan pendapatan yang masih harus diterima. Dari pengklasifikasian piutang tersebut jumlah dari piutang menjadi Rp. 3,039,185,200.

Metode penghapusan piutang ada dua yaitu metode penghapusan secara langsung dan metode penghapusan tidak langsung. Metode penghapusan piutang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah menggunakan metode tidak langsung.

Metode penghapusan piutang tidak langsung adalah dengan membuat akun cadangan kerugian piutang. Pernyataan tersebut sesuai Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah yang membuat akun Penghapusan piutang pada laporan neraca. Akun Penghapusan piutang adalah taksiran awal jumlah piutang yang tak tertagih pada satu tahun periode akuntansi. Pengklasifikasian piutang ini telah disesuaikan pada PSAK no.27. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan pernyataan pada buletin teknis 6, dimana untuk hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam SAK ETAP, entitas koperasi dapat mengacu pada PSAK no.27.

c. Aktiva Tetap

Asset tetap adalah asset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang jasa, untuk disewakan ke pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Jika dilihat pada penerapannya di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur Kecamatan Bungah bahwa asset tetap digunakan dalam penyediaan barang dan jasa yang diperuntukkan bagi tujuan administratif dan operasional entitas.

Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah mengklasifikasikan asset tetap ke dalam 3 kategori yaitu:

- Tanah
- Bangunan Gedung/Kantor
- Inventaris

Suatu pos akan diakui sebagai asset tetap oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah apabila:

- Asset tetap yang dimiliki oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah pada masa depan akan mengalir ke perusahaan. Manfaat ekonomi masa depan terwujud dari potensi yang dimiliki aktiva tetap memberikan sesuatu yang produktif untuk kegiatan operasional perusahaan.
- Biaya perolehan asset tetap Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah dapat diukur secara andal. Hal ini dapat ditunjang dengan melihat dokumen yang ada serta catatan pendukung transaksi perolehan asset tetap.

Selanjutnya juga koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah telah mengikuti kriteria yang disyaratkan oleh SAK ETAP. SAK ETAP mensyaratkan lebih lanjut dalam paragraf 15.5 bahwa tanah dan bangunan adalah asset yang dapat dipisahkan dan harus dicatat secara terpisah meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan. Pemisahan tanah dan bangunan ini telah dilakukan oleh koperasi di dalam neraca (SAK ETAP,2009:68).

Asset tetap yang ada pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah awalnya dicatat sebesar biaya perolehan asset tetap meliputi harga beli ditambah dengan seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva tersebut. Harga perolehan asset tetap Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan

Bungah meliputi harga beli, pajak, biaya angkut, dan biaya-biaya sampai asset tetap siap digunakan dalam kegiatan operasional koperasi.

Dalam hal perolehan asset tetap Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah umumnya diperoleh secara tunai. Namun apabila asset tetap tersebut diperoleh secara kredit, dengan tidak menambahkan unsur bunga kedalam nilai asset tetap, bunga tersebut diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi pada tahun berjalan selama periode kredit.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah tidak mengakui biaya perawatan sehari-hari asset tetap sebagai bagian dari asset tetap tersebut. Beban tersebut diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Selanjutnya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah melakukan penaksiran atas masa manfaat asset tetap, dalam artian Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah melakukan penyusutan terhadap asset tetap. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) untuk menghitung penyusutan atas asset tetap perusahaan. Jadi asset tetap memiliki batas masa pemakaian (kecuali tanah yang masa manfaatnya tidak terbatas).

2. Kewajiban

Kewajiban atau liabilitas adalah utang suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas atau setara kas di masa yang akan datang. Dalam SAK ETAP dijelaskan bahwa kewajiban harus

diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Sedangkan penilaian yang dilakukan oleh koperasi adalah mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada saat terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Maka makin mendekati saat jatuh tempo, nilai kewajiban akan makin mendekati nilai nominal.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah menyajikan kewajiban di dalam neraca berdasarkan likuiditas pos kewajiban, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Hal ini dirasa lebih informatif bagi pengguna laporan keuangan mengingat kegiatan utama yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah berupa jasa. Dalam penerapannya di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur Kecamatan Bungah, kewajiban mencakup jasa anggota, dana pengurus, dana karyawan, dana pendidikan, dana social, dana resiko, kartu belanja, dan SHU belum dibagi. Dan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah kewajiban lancar telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan jumlah nominal sebesar Rp 375,317,248,

Dalam penyajian kewajiban yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur Kecamatan Bungah sedikit menimbulkan pertanyaan atas dana-dana yang jumlahnya terbilang tidak sedikit.

Dana karyawan sebesar Rp 69,493,641 digunakan untuk kesejahteraan karyawan dan bagi karyawan yang berstatus karyawan tetap memperoleh tambahan penghasilan berupa tunjangan uang natuna, gaji ke-13 dan bagian dari SHU. Dana pendidikan sebesar Rp 107,921,351 digunakan untuk membiayai pendidikan pengurus, pengelola, dan pegawai koperasi sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusia dalam mengelola koperasi. Serta untuk pemberian beasiswa bagi para putra-putri anggota koperasi yang berprestasi dalam akademik disekolah mereka. Dana sosial sendiri sebesar Rp. 157.979.122 digunakan untuk peningkatan kesejahteraan anggota koperasi diantaranya untuk anggota koperasi yang meninggal dunia atau keluar dari koperasi, anggota yang sedang mengalami sakit rawat inap, dan pembebasan sisa angsuran kredit bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 10% dari sisa pinjaman dan selain itu juga digunakan untuk membantu masyarakat sekitar yang sedang terkena musibah. kartu belanja dipergunakan untuk masing-masing anggota koperasi untuk mendapat diskon dalam pembelian kebutuhan pokok. Hal ini dilakukan oleh pengelola koperasi agar para anggota koperasi tetap melakukan transaksi pembelian di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah Gresik,

3. Ekuitas

Ekuitas yaitu besarnya kepentingan atau hak pemilik perusahaan pada harta perusahaan. Akun ini menunjukkan posisi atau besarnya ekuitas pada neraca laporan keuangan.

Ekuitas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, Modal Donasi, Cadangan Umum Koperasi, Cadangan Pengembangan Usaha, SHU Tahun Berjalan.

- Simpanan pokok pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah sebesar Rp. 110,000/orang yang harus dibayarkan oleh anggota ketika pertama kali masuk menjadi anggota koperasi.
- Simpanan wajib pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah dimana pada setiap bulannya anggota koperasi harus membayar simpanan wajib sebesar Rp. 100,000/orang dan apabila tidak membayar simpanan wajib melebihi 3 bulan dalam satu tahun maka dinyatakan sebagai anggota non aktif dalam tahun yang bersangkutan.
- Modal donasi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah diperoleh dari sisa pembayaran simpanan pokok.
- Cadangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah terdiri dari cadangan umum koperasi dan cadangan pengembangan usaha.
- Sisa hasil usaha yang diperoleh dalam tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah.

4.2.1.2 Laporan Laba Rugi

Sama halnya dengan laporan neraca yang telah dibahas sebelumnya, laporan laba rugi juga harus diakui dengan metode akrual. Laporan laba rugi yang disusun untuk memberikan gambaran atas kinerja entitas dalam satu periode akuntansi dalam Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah yaitu satu tahun. Laba atau rugi yang diperoleh perusahaan akan masuk mempengaruhi saldo laba dalam Neraca dan bersama perubahan komponen ekuitas lainnya, maka disusunlah Laporan Perubahan Ekuitas.

Dalam laporan keuangan koperasi tidak terdapat laporan laba rugi melainkan laporan perhitungan hasil usaha. Laporan Perhitungan Hasil Usaha adalah bagian laporan keuangan yang menyajikan tentang pos-pos pendapatan dan beban selama satu periode akuntansi, dimana laporan tersebut menunjukkan laba atau kerugian yang didapat dalam satu periode akuntansi tersebut.

Akun-akun laporan Perhitungan Hasil Usaha yang disajikan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah sebagai berikut :

1. Pendapatan

Sesuai dengan paragraf 2.36 SAK ETAP dijelaskan bahwa pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan asset dan kewajiban yang merupakan komponen neraca. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan asset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal (SAK ETAP,2009:12).

Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah pengakuan pendapatan yang dilakukan yaitu berdasarkan dari penjualan barang dagangan dan pemberian jasa yang telah dilakukan. Sedangkan dalam melakukan penilaian pendapatan koperasi melakukannya berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Namun pendapatan yang diperoleh oleh koperasi belum dipisahkan antara pendapatan dari anggota dan non anggota. Sedangkan KPRI “Suka Makmur” Kecamatan Bungah tidak hanya melayani anggota saja melainkan juga melayani non anggota.

Dalam penyajian Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah membagi pendapatan menjadi lebih rinci berdasarkan jenis jasa yang diberikan. Perincian yang dilakukan ini diperbolehkan oleh SAK ETAP sesuai dengan pernyataan paragraf 5.4 karena penyajian rincian ini memberikan informasi yang relevan untuk lebih memahami kinerja koperasi dalam periode tersebut (SAK ETAP,2009:24). Dengan adanya rincian tentang pendapatan tersebut pengguna laporan keuangan yaitu para anggota koperasi dapat melihat secara jelas sumber pendapatan terbesar koperasi, jasa-jasa potensial dan penting bagi koperasi, dan informasi lain terkait kinerja koperasi tersebut.

2. Beban

Beban adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses kegiatan usaha selama satu periode. Beban dalam laporan laba rugi sebagai pengurang pendapatan sehingga menghasilkan laba atau rugi.

Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah beban diakui dalam laporan laba rugi apabila penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan asset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

Dalam penyajian beban di laporan laba rugi yang dibuat oleh koperasi. Beban haruslah diklasifikasikan berdasarkan sifat atau fungsi beban. Dan entitas yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsinya haruslah mengungkapkan informasi tambahan berdasarkan sifat beban, termasuk beban penyusutan dan beban amortisasi dan beban imbalan kerja. Hal ini telah diterapkan dengan baik oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah. Koperasi telah mengklasifikasikan beban menurut fungsinya namun dalam penyusunan laporan laba rugi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai sifat beban melalui subklasifikasi pada masing-masing beban menurut fungsi tersebut.

Terdapat hal yang harus dikritisi pada bentuk penyusunan pos beban ini, yaitu sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa SAK ETAP menyebutkan bahwa entitas harus menyajikan beban pajak menjadi pos tersendiri, sedangkan dalam laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur Kecamatan Bungah beban pajak dimasukkan ke dalam beban umum dan administrasi. Hal ini dapat dilihat dari subklasifikasi pada masing-masing beban menurut fungsinya yang tertera pada buku besar Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah, subklasifikasi pada

masing-masing beban menurut fungsinya dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Subklasifikasi Beban Menurut Fungsinya Pada KPRI Suka Makmur

Beban Organisasi dan Pembinaan	Beban Umum & Administrasi
- Bb. RARK	- Bb. Pengawasan
- Bb. Pendidikan	- Bb. Paket Lebaran
- Bb. Kegiatan Lomba	- Bb. Listrik & Telepon
- Bb. Peningkatan Anggota	- Bb. ATK & Fotocopy
- Bb. Pemb. & Manajemen	- Bb. Pemeliharaan Inventaris
- Bb. Majalah Surat Kabar	- Bb. Pajak Pph
- Bb. Insentif dll	- Bb. Iuran Dekopinda
Beban Operasional	Beban Penyusutan
- Bb. Perjl. Pengurus/Pengawas	- Bb. Penyusutan Gedung
- Bb. Penghapusan Piutang	- Bb. Penyusutan Inventaris
- Bb. Bunga	
- Bb. Promosi	
- Bb. Operasional Lain	

4.2.1.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Sama halnya dengan Neraca dan laporan laba rugi yang telah dibahas sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas juga harus diakui dengan metode akrual. Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut.

Dalam laporan perubahan ekuitas SAK ETAP mewajibkan entitas untuk menyajikan informasi mengenai saldo laba pada awal dan akhir periode serta

penyajian kembali laba setelah dikoreksi kesalahan atau perubahan kebijakan. Laporan ini harus disiapkan setelah laporan laba rugi atau laporan sisa hasil usaha. Laporan perubahan ekuitas adalah salah satu laporan yang diharuskan tercantum dan dibuat secara berkala menurut SAK ETAP.

Dalam penyajian laporan perubahan ekuitas yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur Kecamatan Bungah mengakui transaksi yang terjadi berdasarkan akrual basis dan pada dasarnya penyusunan laporan ekuitas yang dilakukan hampir sesuai dengan laporan perubahan ekuitas yang dikeluarkan oleh SAK ETAP. Karena dalam penyajian laporan perubahan ekuitasnya sudah meliputi saldo laba pada awal periode dan akhir periode serta penyajian kembali laba setelah dikoreksi kesalahan.

Laporan perubahan ekuitas pada akhir tahun 2016 sebesar Rp. 3.570.684.255. Penyajian laporan perubahan ekuitas ini disesuaikan dengan SAK ETAP dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 yang menyatakan bahwa komponen laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, cadangan, dan SHU yang tidak dibagikan pada periode akuntansi.

4.2.1.4 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Menurut

SAK ETAP informasi yang disajikan dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut :

a. Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi.

b. Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

c. Aktivitas Pendanaan

Arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan dapat berupa: Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain, Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas, Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya, Pelunasan pinjaman, Pembayaran kas oleh *lessee* untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai pembayaran dan penerimaan kas perusahaan selama satu periode. Pembuatan laporan keuangan arus kas disarankan dibuat secara rutin setiap satu periode perusahaan atau koperasi. Hal ini dikarenakan agar perusahaan

dapat mengamati arus yang terjadi dan dapat memprediksi perkembangan perusahaan selama satu periode tersebut.

Definisi laporan Arus kas yang diterapkan dalam Koperasi pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah adalah laporan yang menyajikan informasi perubahan historis kas dan setara kas yang dimiliki oleh Koperasi pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah.

Koperasi pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah dalam menyajikan arus kas berdasarkan dari aktivitas operasi yaitu dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini laba atau rugi neto harus disesuaikan dengan mengkoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu maupun di masa mendatang, dan juga unsur pendapatan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan. Dalam penggunaan metode tidak langsung mengakibatkan arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi dari dampak perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha dalam periode berjalan, pos non kas seperti penyusutan dan penyisihan yang masih belum direalisasi, dan pos-pos lain yang berhubungan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.

Sedangkan Koperasi pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah dalam menyajikan arus kas berdasarkan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan yaitu berdasarkan pemisahan secara terpisah kelompok

utama penerimaan kas broto dan pengeluaran bruto yang ada pada aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

Sesuai dengan SAK ETAP (2009,30) menyatakan entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan metode tidak langsung. Dalam metode ini laba atau rugi netto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau biaya yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.

4.2.1.5 Catatan atas laporan Keuangan

Entitas harus membuat suatu pernyataan secara eksplisit dan penuh pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Catatan atas laporan keuangan pada dasarnya berfungsi untuk memberikan informasi sebagai tambahan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan SAK ETAP (2009:34) menyatakan catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan. Catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal berikut:

- a. Dasar penyusunan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan.

- b. Informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan.
- c. Informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan entitas tersebut.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam hal ini Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur Kecamatan Bungah tidak membuat atau memiliki catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan. sehingga koperasi belum secara penuh menerapkan SAK ETAP sebagai panduan dalam menyajikan laporan keuangannya. Karena suatu laporan keuangan yang lengkap berdasarkan SAK ETAP harus memiliki catatan atas laporan keuangan, sedangkan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Suka Makmur Kecamatan Bungah tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangannya. Sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas dasar penyusunan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan. Yang kemudian menyebabkan kurangnya informasi secara jelas dan terperinci bagi para pengguna laporan keuangan yakni para anggota koperasi dalam memahami keberadaan posisi keuangannya. Yang dalam keadaan yang sebenarnya anggota koperasi tidak semuanya faham akan tentang akuntansi yang secara mendetail. Dan dalam penyajian neraca Koperasi Pegawai Republik Indonesia Suka Makmur Kecamatan Bungah tidak menyajikan kewajiban pajak sehingga kepatuhan terhadap pajak dipertanyakan apabila para pengguna laporan

keuangan tersebut tidak memahami laporan secara yang telah dibuat secara seksama dan hati-hati.

4.2.2 Membandingkan Sistem Laporan Keuangan KPRI “Suka Makmur” Kecamatan Bungah dengan SAK ETAP

4.2.2.1 Konsep Laporan Keuangan

Untuk mengetahui perbandingan penerapan konsep laporan Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah dengan SAK ETAP dapat dilihat pada tabel 4.4 Sebagai berikut:

Tabel 4.4
Perbandingan Laporan Keuangan KPRI Suka Makmur dengan SAK ETAP

KPRI “Suka Makmur”	SAK ETAP
Laporan keuangan terdiri dari: 1. Neraca 2. Sisa hasil usaha 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas	Laporan keuangan terdiri dari: 1. Neraca 2. Perhitungan hasil usaha 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan

Sumber data: KPRI “Suka Makmur” dan SAK ETAP

Sesuai dengan SAK ETAP, dijelaskan bahwa laporan keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah hanya terdapat 4 laporan keuangan yaitu neraca, sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Sehingga bisa dikatakan laporan keuangan yang ada pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

“Suka Makmur” Kecamatan Bungah masih belum sesuai dengan SAK ETAP karena tidak mencantumkan catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang dipakainya.

4.2.2.2 Konsep Asset

Perbandingan penerapan konsep asset pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah dengan SAK ETAP dapat dilihat pada tabel 4.5 Sebagai berikut:

Tabel 4.5
Perbandingan Konsep Asset pada KPRI Suka Makmur dengan SAK ETAP

KPRI “Suka Makmur”	SAK ETAP
Konsep asset terdiri dari: Aset lancar • Kas dan bank • Piutang usaha • Pendapatan yang masih harus diterima Asset tidak Lancar • Simpanan pokok dan wajib di PKP RI • Simpanan wajib pinjam di PKP RI • Simpanan Sukarela di PKP RI • Modal dipertokoan, modal disetor Dan modal tetap tambahan Asset Tetap • Tanah • Bangunan Gedung • Inventaris • Akumulasi penyusutan	Konsep asset terdiri dari: Aset lancar • Kas dan bank • Surat berharga • Piutang usaha • Piutang pinjaman anggota • Piutang pinjaman non anggota • Peny. Piutang tak tertagih • Beban dibayar di muka Aset tidak lancar • Investasi • Aset tetap, meliputi tanah/ hak atas tanah, bangunan, mesin/kendaraan, inventaris, Ak. Penyusutan • Aset tidak berwujud, meliputi hak paten, hak cipta, hak pengusaha hutan, kuota impor/ekspor, waralaba • Aset tidak lancar lainnya

Sumber data: KPRI “Suka Makmur” dan SAK ETAP

Dilihat dari tabel diatas dari masing-masing asset mengalami perbedaan antara lain:

- a. Pada asset lancar yaitu akun piutang pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah masih belum memisahkan antara piutang anggota dengan piutang non anggota. Sedangkan menurut SAK ETAP masing-masing piutang harus dibedakan misalnya antara piutang anggota dengan non anggota, piutang usaha dan piutang lain-lainnya. Melihat jumlah pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah kepada anggota dan non anggota berbeda, maka seharusnya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah membedakan antara piutang anggota dan non anggota sehingga anggota mengetahui seberapa besar masing-masing piutang yang ada dengan hal itu anggota akan mengetahui keuangan perusahaan.

Dalam hal ini membutuhkan jurnal reklasifikasi sebagai berikut:

Jurnal penyesuaian:

Piutang anggota	Rp xxxx
-----------------	---------

Piutang non anggota	Rp xxxx
---------------------	---------

Piutang Lain-lain	Rp xxxx
-------------------	---------

Piutang anggota	Rp xxxx
-----------------	---------

- b. Pada asset tetap Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah sudah menjelaskan secara terperinci tentang akun apa saja yang ada pada koperasi. Namun dalam akun inventaris tidak

disebutkan secara jelas inventaris apa saja yang digunakan. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan pada asset tetap sehingga tidak bisa diketahui asset tetap pada koperasi dan berapa besar akumulasi penyusutan dari asset tetap inventaris tersebut. Melihat pembahasan sebelumnya bahwa asset tetap inventaris terdiri ATK yang merupakan perlengkapan yang umur ekonomisnya kurang dari satu tahun maka seharusnya ATK termasuk asset lancar. Jurnal yang diperlukan dalam pemindahan perlengkapan dari asset tetap ke asset lancar jurnal reklasifikasinya sebagai berikut:

Asset lancar (peralatan)	Rp xxxx
Asset tetap (Peralatan)	Rp xxxx

4.2.2.3 Konsep Kewajiban

Perbandingan konsep kewajiban yang diterapkan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah dengan SAK ETAP dapat dilihat pada tabel 4.6 Sebagai berikut:

Tabel 4.6
Perbandingan Konsep Kewajiban pada KPRI dengan SAK ETAP

KPRI “Suka Makmur”	SAK ETAP
1. Dana pengurus 2. Dana karyawan 3. Dana pendidikan 4. Dana sosial 5. Dana resiko 6. Kartu belanja	1. Kewajiban jangka pendek, meliputi simpanan anggota, SHU bagian anggota, utang usaha, utang bank/lembaga lainnya, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka 2. Kewajiban jangka panjang, meliputi utang bank/lembaga lainnya, kewajiban imbalan pasca kerja, kewajiban jangka panjang lainnya

Sumber data: KPRI “Suka Makmur” dan SAK ETAP

pengakuan dan pengukuran pada kewajiban menurut Standar Akuntansi Keuangan ETAP berbunyi kewajiban jangka pendek atau jangka panjang diakui sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan telah dicatat sebesar nilai nominal kewajiban tersebut.

Kewajiban dalam koperasi dapat diklarifikasikan menjadi kewajiban kepada anggota dan bukan anggota. Kewajiban yang timbul dari transaksi dengan anggota disajikan secara terpisah sebagai utang kepada anggota. Sebaliknya kewajiban yang timbul dari transaksi yang bukan anggota disajikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kemudian kewajiban sukarela disajikan sebagai kewajiban lancar atau jangka panjang sesuai jatuh temponya. Kewajiban yang timbul karena pembagian SHU disajikan sebagai kewajiban lancar, kecuali ditetapkan oleh rapat anggota tidak dibagi.

Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah konsep kewajiban terdiri dari dana pengurus, dana karyawan, dana pendidikan, dana sosial, dana resiko dan kartu belanja.

Melihat tabel perbandingan konsep kewajiban di atas bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah belum sesuai dengan SAK ETAP dikarenakan belum membedakan antara utang simpanan anggota dan utang simpanan non anggota. Perbedaan ini agar mempermudah pembagian jasa simpanan pada koperasi. Akan tetapi perlu diketahui untuk pemberian jasa simpanan sesuai dengan kesepakatan pada rapat anggota tahunan. Jurnal reklasifikasinya untuk simpanan anggota adalah sebagai berikut:

Simpanan anggota	Rp xxxx
Simpanan anggota	Rp xxxx
Simpanan non anggota	Rp xxxx

4.2.2.4 Konsep Ekuitas

Menurut SAK ETAP dan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 4/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi, ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.

Perbedaan penerapan konsep ekuitas antara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah dengan SAK ETAP dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Perbandingan Konsep Ekuitas pada KPRI dengan SAK ETAP

KPRI “Suka Makmur”	SAK ETAP
1. Simpanan pokok	1. Simpanan pokok
2. Simpanan wajib	2. Simpanan wajib
3. Modal donasi	3. Modal penyertaan
4. Cadangan umum koperasi	4. Modal sumbangan
5. Cadangan pengembangan usaha	5. Cadangan.
6. SHU tahun berjalan	6. Sisa hasil usaha yang belum dibagikan

Sumber data: KPRI “Suka Makmur” dan SAK ETAP

a. Modal Anggota

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia 4/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi,

menyebutkan modal anggota terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya, penyajian nilai simpanan pokok dan simpanan wajib di neraca adalah dengan menyajikan nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib.

Jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima koperasi dari anggota disajikan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah sebagai pendapatan yang masih harus diterima di dalam neraca. Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah untuk simpanan pokok yang harus dibayar pada saat masuk menjadi anggota sebesar Rp 110,000 sedangkan untuk simpanan wajib yang harus dibayar tiap bulannya adalah sebesar Rp 100,000.

b. Modal Penyertaan

Dalam SAK ETAP modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran anggota. Dalam hal modal penyertaan yang diterima selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima. Modal penyertaan ikut menutup resiko kerugian dan memiliki sifat relatif permanen. Dan imbalan atas permodalan didasarkan atas hasil usaha yang diperoleh. Oleh karena itu modal penyertaan tersebut diakui sebagai ekuitas.

Pada koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota diakui sebagai modal donasi. Imbalan atas permodalan didasarkan atas

hasil usaha yang diperoleh dan telah ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

c. Cadangan

Pada SAK ETAP, pembentukan cadangan dapat ditujukan antara lain untuk mengembangkan usaha koperasi, menutup resiko kerugian, dan pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi. Cadangan yang dibentuk dari sisa hasil usaha dicatat dalam akun cadangan. Tujuan penggunaan cadangan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah membentuk cadangannya berupa cadangan umum koperasi dan cadangan pengembangan usaha.

d. Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan

Pada SAK ETAP disebutkan sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil usaha telah diatur secara jelas, maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Suatu kebiasaan dalam koperasi, bahwa sisa hasil usaha yang diperoleh dalam tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Keharusan pembagian sisa hasil usaha tersebut juga dinyatakan dalam undang-undang perkoperasian.

Jika dilihat pada tabel di atas penerapan konsep ekuitas sudah sesuai sesuai dengan SAK ETAP tentang akuntansi koperasi. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah telah mencantumkan modal donasi pada laporan keuangnya pada periode 2016.

4.2.2.5 Konsep Pendapatan

Perbandingan konsep pendapatan yang diterapkan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah dengan SAK ETAP tentang akuntansi koperasi dapat dilihat dari tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Perbandingan Konsep Pendapatan pada KPRI dengan SAK ETAP

KPRI “Suka Makmur”	SAK ETAP
1. Pendapatan pertokoan 2. Pendapatan jasa UPB 3. Pendapatan jasa sepeda motor 4. Pendapatan lain-lain (provisi, bank dll) 5. Laba penjualan tanah 6. SHU dan jasa dari PKP RI	1. Pelayanan anggota 2. Pendapatan non anggota 3. Pendapatan lainnya

Sumber data: KPRI “Suka Makmur” dan SAK ETAP

Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor non anggota.

Pada kondisi dilapangan, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah masih belum sesuai dengan SAK ETAP

karena belum memisahkan antara pendapatan anggota dan pendapatan non anggota. Sedangkan pada realitanya yang ada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah tidak hanya melayani anggota tetapi juga melayani non anggota.

Oleh karena itu laporan keuangan koperasi harus dapat mencerminkan tujuan koperasi, maka perhitungan hasil usaha harus menginformasikan secara jelas kegiatan koperasi dengan anggotanya. Karena itu pendapatan dari anggota disajikan terpisah dari pendapatan yang berasal dari transaksi non anggota. Penyajian itu lebih mencerminkan bahwa usaha koperasi lebih mementingkan transaksi atau pelayanan kepada anggotanya daripada non anggota. Jurnal reklasifikasi yang dibutuhkan untuk memisahkan antara pendapatan anggota dan pendapatan non anggota adalah sebagai berikut:

Pendapatan usaha	Rp xxxx
Pendapatan anggota	Rp xxxx
Pendapatan non anggota	Rp xxxx

4.2.2.6 Konsep Beban

Perbandingan penerapan konsep beban yang diterapkan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah dengan SAK ETAP tentang akuntansi koperasi dapat dilihat dari tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9**Perbandingan Konsep Beban pada KPRI dengan SAK ETAP**

KPRI “Suka Makmur”	SAK ETAP
1. Beban organisasi dan pembinaan 2. Beban operasional 3. Beban umum dan administrasi 4. Beban penyusutan	1. Beban operasional • Beban usaha • Beban perkoperasian • Beban lain-lain 2. Beban pajak

Sumber data: KPRI “Suka Makmur” dan SAK ETAP

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia 4/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi konsep beban operasional dalam laporan perhitungan sisa hasil usaha merupakan gabungan antara beban usaha dan beban perkoperasian. Beban usaha terdiri dari beban-beban penjualan dan beban administrasi dan umum, sedangkan beban yang dikeluarkan untuk meningkatkan sumber daya para anggotanya dan pengembangan koperasi disebut dengan beban perkoperasian. Dan dalam penyusunan beban pajak tidak dipisahkan secara tersendiri dalam laporan sisa hasil usaha melainkan beban pajak dimasukkan kedalam pos beban umum dan administrasi.

Hal ini untuk memberikan kejelasan dalam laporan sisa hasil usaha dengan asumsi bahwa pengklasifikasian beban menurut fungsinya dapat memberikan petunjuk bagi koperasi dan para anggotanya tentang seberapa besar beban yang dikeluarkan selama satu tahun atau periode apakah sedang mengalami kenaikan atau penurunan dari tahun yang sebelumnya. Sehingga pihak koperasi dapat mengambil keputusan untuk tahun kedepannya atau periode yang akan datang.

Tabel 4.10
Perbandingan Laporan Keuangan KPRI “Suka Makmur” Kecamatan Bungah dengan SAK ETAP

KETERANGAN	SAK ETAP	KPRI “Suka Makmur”	KESESUAIAN
PENYAJIAN			
	Penyajian wajar	telah berupaya menyajikan laporan keuangan secara wajar, jujur berdasarkan transaksi, dan diukur menurut kriteria pengakuan yang sudah ditetapkan	√
	Kepatuhan terhadap SAK ETAP	Telah menerapkan SAK ETAP	√
	Kelangsungan usaha	Menyajikan analisis tingkat kesehatan (likuiditas, rasio kas, solvabilitas, rentabilitas, dan kecukupan modal)	√
	Frekuensi pelaporan	Rutin mengeluarkan laporan keuangan tahunan yang terintegral dalam laporan Rapat Anggota Tahunan	√
	Penyajian yang konsisten	Pos-pos yang disajikan oleh KPRI “Suka Makmur” tahun 2015-2016 konsisten	√
	Informasi komparatif	Telah menyajikan secara komparatif untuk laporannya	√
	Materialitas dan agregasi	Telah memisahkan materialitas dan agregasi	√
KEBIJAKAN AKUNTANSI			
	Menyajikan neraca, perhitungan sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan	Laporan keuangan hanya menyajikan neraca, perhitungan sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas	X

	Disusun berdasarkan SAK yang berlaku, yaitu SAK ETAP	Telah menerapkan SAK ETAP	√
PENGUKURAN			
Kas atau setara kas	• Berbasis akrual • Biaya historis • Nilai wajar	• Berbasis akrual • Biaya historis • Nilai wajar	√
Aktiva tetap	• Berbasis akrual • Biaya historis • Nilai wajar • Metode penyusutan: garis lurus, saldo menurun, jumlah unit produksi • Dasar perhitungan: per setahun dan dihitung mulai dari tanggal perolehan • Umur ekonomis: (1) gedung & kios 20 tahun 5%; (2) kendaraan 10 tahun-10%; dan (3) peralatan kantor 5 tahun-20% • Gedung disusutkan	• Berbasis akrual • Biaya historis • Nilai wajar • Metode penyusutan: garis lurus • Dasar perhitungan: per setahun dan dihitung mulai dari tanggal perolehan • Umur ekonomis: tidak dijelaskan • Gedung disusutkan	X
Pendapatan	• Berbasis akrual • Biaya historis • Nilai wajar	• Berbasis akrual • Biaya historis • Nilai wajar	√
Biaya pembayaran	• Berbasis akrual • Biaya historis • Nilai wajar	• Berbasis akrual • Biaya historis • Nilai wajar	√
Pajak penghasilan	UU Pajak Penghasilan	UU Pajak Penghasilan (perlakuan khusus	√

		pajak koperasi yaitu 10% SHU berjalan)	
Imbalan kerja	• Berbasis akrual • Biaya historis • Nilai wajar	• Berbasis akrual • Biaya historis • Nilai wajar	√
Pembagian SHU	UU Pengkoperasian, pembagian SHU menurut AD dan ART	• UU Pengkoperasian, pembagian SHU menurut AD dan ART • Pembagian SHU tidak disajikan dalam laporan keuangan	X
UNSUR-UNSUR LAPORAN NERACA KEUANGAN			
	Kas dan setara kas	Kas dan Bank	√
	Piutang usaha dan piutang lainnya	Piutang barang, piutang sepeda motor, piutang di USP/Modal di USP, pendapatan yang masih harus diterima	√
	Persediaan	Tidak ada persediaan	X
	Properti investasi	Tidak ada property investasi	X
	Aset tetap	Aset tetap: Tanah, bangunan gedung, ak penyusutan gedung, inventaris, ak penyusutan inventaris	√
	Aset tidak berwujud	Tidak ada aset tidak berwujud	X
	Utang usaha dan utang lainnya	Tidak ada hutang bank maka tidak ada hutang yang dimasukkan dalam kewajiban jangka panjang	X
	Aset dan kewajiban pajak	Tidak dijelaskan aset dan kewajiban pajak dalam penyajian neraca	X
	Kewajiban diestimasi	Tidak dijelaskan kewajiban diestimasi	X

		dalam penyajian neraca	
	Ekuitas	Permodalan meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, modal donasi, dana cadangan umum koperasi, dana cadangan pengembangan usaha dan SHU tahun berjalan	√
UNSUR-UNSUR PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA			
	Pendapatan	Pendapatan pertokoan, pendapatan UPB (elektro, busana, dll), pendapatan jasa sepeda motor, pendapatan lain-lain (provisi, jasa Bank dll)	√
	Beban keuangan	Beban organisasi dan pembinaan, beban operasional, beban umum dan administrasi, beban penyusutan	√
	Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas	SHU sebelum pajak	√
	Beban pajak	Beban pajak	√
	laba atau rugi netto	SHU setelah pajak	√
UNSUR LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Laba atau rugi entitas untuk suatu periode,	Saldo ekuitas per 1 januari	√
	Pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut,	Koperasi tidak melakukannya	X
	Koreksi kesalahan atau perubahan kebijakan akuntansi	Koperasi tidak melakukan perubahan akuntansi ataupun koreksi kesalahan pada tahun 2016	X

	Jumlah investasi, dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut.	SHU	√
UNSUR LAPORAN ARUS KAS			
	Aktivitas Operasi	Perubahan piutang usaha, penambahan persediaan kartu belanja, perubahan dana karyawan, dana pendidikan, dana sosial, perubahan persediaan	√
	Aktivitas Investasi	Perubahan aktiva tetap	√
	Aktivitas Pendanaan	Perubahan simpanan pokok, perubahan simpanan wajib, perubahan modal donasi, perubahan cadangan umum koperasi, cadangan pengembangan usaha	√
UNSUR-UNSUR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
	Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan	Tidak	X
	Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan	Tidak	X
	Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan	Tidak	X

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Laporan keuangan berperan sangat penting dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis. Disamping sebagai acuan bagi pemilik usaha dalam melakukan suatu pengambilan keputusan, juga yang paling utama untuk memperoleh gambaran kondisi kinerja keuangan usaha yang sedang dijalankan apakah sedang mengalami kemajuan atau sedang mengalami penurunan kinerja usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur Kecamatan Bungah dengan kesesuaiannya dengan standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan untuk penyusunan laporan keuangan koperasi yaitu SAK ETAP. Berdasarkan hasil penelitian terhadap laporan keuangan yang disusun oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur Kecamatan Bungah ditinjau berdasarkan SAK ETAP dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur Kecamatan Bungah telah menerapkan SAK ETAP.
2. Pada laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur Kecamatan Bungah masih belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP. Karena dalam penyusunan laporannya masih

terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP. Misalnya dalam penyusunan laporan laba rugi koperasi tidak mencantumkan beban pajak. Beban pajak tidak menjadi pos tersendiri namun dimasukkan ke dalam beban umum dan administrasi. sedangkan dalam laporan kas yang disusunnya masih belum secara jelas melakukan klasifikasi ke dalam arus kas operasi, investasi, dan pendanaan.

3. Dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur Kecamatan Bungah tidak melakukan penyusunan catatan atas laporan keuangan dan hanya menyusun neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Padahal keberadaan catatan atas laporan keuangan sangatlah dibutuhkan karena dapat diketahui kebijakan apa saja yang telah digunakan oleh pihak koperasi.

5.2 SARAN

Dari kesimpulan tersebut terdapat beberapa saran khususnya untuk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur Kecamatan Bungah antara lain yaitu :

1. Dalam penyusunan laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur Kecamatan Bungah hendaknya menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2. Dalam penyusunan laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Suka Makmur Kecamatan Bungah belum memakai catatan atas laporan keuangan, maka untuk laporan keuangan selanjutnya sebaiknya dibuat catatan atas laporan keuangan yang memuat tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang selama ini diterapkan oleh pihak koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai acuan untuk pihak eksternal yang berkepentingan untuk memahami laporan keuangan yang telah disusun.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'anul Karim dan Terjemahan.

Andreas, Beth Sianne. 2014. *Evaluasi Atas Penerapan Standar Akuntansi Publik Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Laporan Keuangan Koperasi di Bandar Lampung*, Universitas Lampung, Lampung.

Ariantini, Ni Luh Gede. 2014. Penerapan SAK ETAP Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Lembing Sejahtera Mandiri. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.4, No.1.

Baridwan, Zaki. 2010. *Intermediate Accounting*, BPFE, Yogyakarta.

Belkaoui, dan Ahmed Riahi. 2006. *Teori Akuntansi*, Buku I, Edisi Lima, Salemba Empat, Jakarta.

Djawa, 2013. Diakses tgl 5 mei 2014 dari elib.unikom.ac.id/.../jpbtunikompp-gdl-itayustiaw-16245-3-babii.doc

Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.

Hasan, I. 2009. *Pokok-pokok Materi Statistika 1 (Statistik Deskriptif)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.

Kieso, Donald E, dkk. 2007. *Akuntansi Intermediate*, Edisi Ke-12, Jilid 1, Erlangga, Jakarta.

- Lubis, Zulkarnain. 2008. *Koperasi Untuk Ekonomi Rakyat*. Cita Pustaka Media, Medan.
- Lungan, R. 2006. *Aplikasi Statistika dan Hitung Peluang*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyani. 2013. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi Mandiri Jaya Tanjung Pinang Dan Koperasi Karyawan Plaza Hotel Tanjung*. Artikel, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Margono. 2000. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Niswonger, C. Rollin, dkk. 2003. *Prinsip-prinsip Akuntansi*, Edisi Ke-19, Jilid 1, Erlangga, Jakarta.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodelogi Penelitian*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nurdita, J S Raflesia. 2013. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi yang Ada di Kota Dumai*, Skripsi tidak diterbitkan. Program Sarjana Universitas Riau, Riau.
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2015. PERMEN NOMOR 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi. Jakarta.
- Pratiwi, 2014. *Analisis Penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan PT. Nichindo Suisan Manado*. Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol 2, No 3. Hal.254-265.
- Raharjo, Budi. 2002. *Akuntansi Keuangan Untuk Manajer Non Keuangan*. Erlangga, Jakarta.

Republik Indonesia. 1992. *Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian*. Sekretariat Negara, Jakarta.

Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. PT Grasindo, Jakarta.

Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi dan Teori Praktik*. Erlangga, Jakarta

Soemarso, S. R. 2002. *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Keempat, Buku I, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta, Bandung.

Sumarsono. 2003. *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Suwandi, dan Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Syafi'I, Imam. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid I. Bogor.

Utami, K Ayu Laksmi. 2012. *Analisa Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Urip Sejahtera" Kubutambahan Tahun 2011*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.

Weygandt, Jerry J, dkk. 2007. *Pengantar Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta.

Yati, Ni Nyoman Pera, Anantawikrama Tungga Atmaja dan I made Pradana Adi Putra. 2013. *Penyajian Laporan Keuangan Kolperasi Mahasiswa "Citra Dana" Universitas Pendidikan Ganesha Berdasarkan SAK ETAP*. Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. (Volume3 No. 1)



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

Nomor : Un.3.5/TL.00/0165/2017
Lampiran : 1 bendel Proposal Penelitian
Perihal : Ijin Penelitian Skripsi

13 February 2017

Kepada Yth.
Pimpinan KPRI "Suka Makmur" Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi bagi mahasiswa kami, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : Qurrotul 'Ainia
Nomor Induk Mahasiswa : 10520030
Semester : XIV (Empat Belas)
Lokasi Penelitian : Jl. Raya Bungah - Dukun No. 06 Kode Pos 61152
Judul Penelitian : Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP pada KPRI "Suka Makmur" Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



a.n. Dekan
Jurusan,

Harik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

Tembusan :

1. Dekan Sebagai Laporan
2. Para Wakil Dekan
3. Kabag Tata Usaha
4. Arsip



Certificate No. ID08/1219

NERACA SCONTRIO
KP RI SUKA MAKMUR KECAMATAN BUNGAH
PER 31 DESEMBER 2016

NO	ASET	TAHUN		NO	KEWAJIBAN & EQUITAS	TAHUN	
		2015	2016			2015	2016
I	Aset Lancar			IV	Kewajiban Lancar		
1	Kas	5.745.335	6.252.744	24	Jasa Anggota	-	-
2	Bank	508.107.770	353.165.425	25	Dana Pengurus	331.134	331.134
3	Piutang Barang	614.503.620	976.985.320	26	Dana Karyawan	62.052.223	69.493.641
4	Piutang Sepeda Motor	331.398.650	339.889.850	27	Dana Pendidikan	94.025.533	107.921.351
5	Barang dagangan (tanah)	-	400.336.500	28	Dana Sosial	139.158.395	157.979.122
6	Piutang di USP/modal di USP	1.483.537.500	1.301.537.500	29	Dana Resiko	31.476.000	27.342.000
7	Ph. Piutang	(5.000.000)	(9.000.000)	30	Kartu belanja	2.400.000	12.250.000
8	Pendapatan y.m.h diterima	20.754.376	20.436.030	31	SHU belum dibagi	-	-
	Jumlah Aset Lancar	2.959.048.251	3.389.603.369		Juml Kewajiban Lancar	329.443.285	375.317.248
II	Aset Tidak Lancar			V	Kewajiban Tidak Lancar		
9	Simpanan Pokok di PKP RI	10.000.000	10.000.000				
10	Simpanan Wajib di PKP RI	81.749.070	92.672.000	31	Hutang uang di PKP RI	-	-
11	Simp. Wajib Pinjam di PKP RI	57.068.700	59.808.300	32	Hutang modal di Bank	-	-
12	SPPU di PKP RI	46.086.035	51.051.035				
13	Gerakan menabung	103.310	103.310				
14	Simp. Suka Rela di PKP RI	3.328.200	3.689.400				
15	S K P B	770.000	770.000				
16	Modal di pertokoan	47.011.072	57.011.072				
17	Modal disetor	15.000.000	15.000.000				
18	Modal tetap tambahan	64.000.000	64.000.000				
	Juml Aset Tidak Lancar	325.116.317	354.105.117		Jumlah	-	-
III	Aset Tetap			VI	Equitas		
19	Tanah	14.312.400	14.312.400	33	Simpanan Pokok Anggota	36.300.000	35.970.000
20	Bangunan Gedung/Kantor	243.201.245	243.201.245	34	Simpanan Wajib Anggota	2.236.014.950	2.541.552.550
21	Ak. Penyusutan Gedung	(79.068.108)	(91.578.170)	35	Modal Donasi	6.200.000	6.200.000
22	Inventaris	95.907.250	100.522.250	36	Cadangan Umum Koperasi	719.955.259	818.330.168
23	Ak. Penyusutan Inventaris	(54.193.508)	(64.164.708)	37	Cadangan Pengembangan Usaha	24.962.452	24.962.452
				38	SHU Tahun Berjalan	151.447.901	143.669.085
	Jumlah	220.159.279	202.293.017		Jumlah	3.174.880.562	3.570.684.255
	JUML. SELURUH ASSET	3.504.323.847	3.946.001.503		JML. KEWAJIBAN & EQUITAS	3.504.323.847	3.946.001.503

1. H. MAT UDI, S.Pd, MM.
2. Drs. MISWADI
3. Drs. THOHIR MUBTADA'II
4. KUSDARSYANTO, S.Pd
5. Hj. SUGIARTI, M.Pd

Bungah, 31 Desember 2016
Pengurus KP RI Suka Makmur Bungah

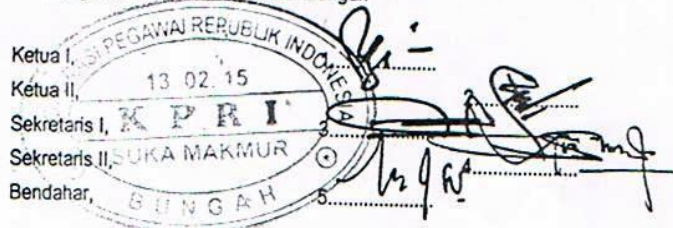
Ketua I,

Ketua II,

Sekretaris I,

Sekretaris II,

Bendahar,



IKHTISAR HASIL USAHA KP RI SUKA MAKMUR BUNGAH
(LEMBAGA)
PER 31 DESEMBER 2016

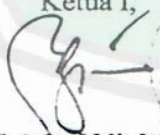
NO	URAIAN	2015	2016
I	PENDAPATAN		
1	Pendapatan Pertokoan	20.754.376	20.436.030
2	Pend. Jasa UPB (Electro, busana dll)	133.410.950	161.322.495
3	Pendapatan Jasa sepeda motor	66.403.050	68.356.525
4	Pend. Lain-lain (provisi, jasa Bank dll)	5.833.557	8.637.319
5	Laba penjualan tanah	34.195.586	12.444.000
6	SHU & Jasa dari PKP RI	19.884.600	19.909.200
	Jumlah Pendapatan	280.482.119	291.105.569
II	BIAYA/BEBAN		
1	Beban Organisasi dan Pembinaan	24.240.933	30.628.491
2	Beban Operasional	15.394.479	18.247.164
3	Beban Umum dan Administrasi	67.750.544	76.079.567
4	Beban penyusutan	21.648.262	22.481.262
	Jumlah Beban	129.034.218	147.436.484
III	PENDAPATAN - BIAYA	151.447.901	143.669.085
	SISA HASIL USAHA (SHU)	151.447.901	143.669.085

Bungah, 31 Desember 2016

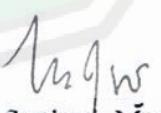
Pengurus KP RI Suka Makmur Bungah

Ketua I,

Bendahara,


H. Met Udi, MM




Hj. Sugiarti, M.pd

PERUBAHAN EKUITAS/KEKAYAAN BERSIH
KP RI SUKA MAKMUR BUNGAH
PER : 31 DESEMBER 2016

NO	URAIAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016	
1	Saldo ekuitas per 1 Januari :	-	2.765.390.517	-	3.174.880.562
2	Ditambah dari :				
	a. Simpanan Pokok	880.000		(330.000)	
	b. Simpanan Wajib	334.403.100		305.537.600	
	c. Donasi	-		-	
	c. Cadangan Umum	96.571.293		98.374.909	
	d. Cad. Pengembangan Usaha	6.619.500		-	
	e. SHU Tahun berjalan	151.447.901		143.669.085	
			589.921.794		547.251.594
			3.355.312.311		3.722.132.156
3	Dikurangi SHU tahun lalu		180.431.749		151.447.901
	Saldo Ekuitas per 31 Des.	-	3.174.880.562	-	3.570.684.255

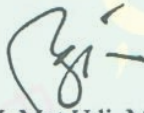
Bungah, 31 Desember 2016

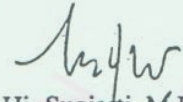
Koperasi Pegawai Republik Indonesia

Kecamatan Bungah,

Bendahara,

Ketua I,


H. Mat Udi, MM


Hi. Sugiarti, M.Pd

KP RI SUKA MAKMUR BUNGAH
LAPORAN ARUS KAS (LEMBAGA)
PER 31 DESEMBER 2016

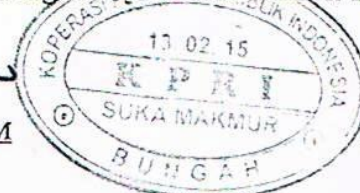
NO	URAIAN	TH. 2015	TH. 2016
I	SUMBER :		
	Sisa Hasil Usaha	151.447.901	143.669.085
A	Penyesuaian Dasar Kas		
	Penyusutan Asset Tetap	21.648.262	22.481.262
	Penambahan Piutang barang (UPB)	(102.766.125)	(362.481.700)
	Penambahan Piutang sepeda Motor	1.233.475	(8.491.200)
	Penambahan Persediaan barang (tanah)	198.704.414	(400.336.500)
	Penurunan Piutang di USP	(79.500.000)	182.000.000
	Penurunan penyisihan piutang tak tertagih	3.000.000	4.000.000
	Pengurangan Pend. Yang masih hrs diterima	1.862.530	318.346
	Penambahan Dana Karyawan	11.434.915	7.441.418
	Penambahan Dana Pendidikan	15.095.215	13.895.818
	Penambahan Dana sosial	21.477.823	18.820.727
	Penurunan Dana Resiko	5.478.000	(4.134.000)
	Penambahan persediaan kartu belanja	(6.750.000)	9.850.000
	Jumlah	90.918.509	(516.635.829)
B	Finansial :		
	Penurunan simp. Pokok	880.000	(330.000)
	Penambahan simp Wajib	334.403.100	305.537.600
	Penambahan modal Donasi	-	-
	Penambahan cad. Umum	96.571.293	98.374.909
	Cad. Pengembangan Usaha	6.619.500	-
	Jumlah	438.473.893	403.582.509
	Total Sumber Asset	680.840.303	30.615.765
II	PENGUNAAN :		
	Penambahan Penyertaan	18.846.300	28.988.800
	Penambahan Asset	10.650.000	4.615.000
	Pembagian SHU Tahun lalu	180.431.749	151.447.901
	Total Penggunaan Kas	209.928.049	185.051.701
	Kenaikan /Penurunan Kas	470.912.254	(154.435.936)
	Saldo Kas/Bank Awal Tahun	42.941.851	513.854.105
	Saldo Kas/Bank Akhir Tahun	513.854.105	359.418.169

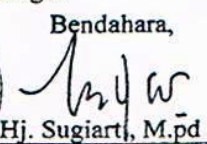
Gresik, 31 Desember 2016

Pengurus KP RI Suka Makmur Bungah

Ketua I,

H. Mat Udi, MM



Bendahara,

Hj. Sugiarti, M.pd

PANDUAN WAWANCARA

1. Sejak kapan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah ini berdiri?
2. Apakah dari awal berdirinya koperasi hingga sekarang telah menempati lokasi kantor yang sama?
3. Bagaimana cara pengangkatan atau pemilihan pengurus dan pengawas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah ini dan berapa masa jabatan ketika menjadi seorang pengurus dan pengawas?
4. Hingga saat ini berapakah jumlah anggota yang tergabung dalam Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah ini?
5. Dalam menjalankan kegiatan koperasi, usaha apa yang dilakukan oleh pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah?
6. Apakah dalam melakukan kegiatan transaksi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah selalu melakukan pencatatan?
7. Apakah dalam kegiatannya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah membuat laporan keuangan dan bagaimana pelaporan itu dilakukan?
8. Dalam menjalankan usahanya koperasi memiliki lebih dari 1 unit usaha, bagaimana cara pelaporan yang dibuat?
9. Apakah dalam melakukan penyusunan laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah telah menggunakan software akuntansi yang ada?
10. Selama membuat laporan keuangan, laporan apa sajakah yang telah dibuat?
11. Apakah tujuan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Suka Makmur” Kecamatan Bungah dalam melakukan penyusunan laporan keuangan?

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Qurrotul 'Ainia
 Tempat, tanggal lahir : Gresik, 17 Mei 1993
 Alamat Asal : Jl. Raya Bungah Dukun No. 26 Rt. 17 A Rw. 006
 Alamat Kos : Jl. Sumbersari Gang 1B No. 27 Malang
 Telepon/HP : 081233670012
 E-mail : neeya.ainia91@gmail.com

Pendidikan Formal

1996-1998 : TK Muslimat 03 Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik
 1998-2004 : MI Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik
 2004-2007 : MTs. Maarif Assa'adah II Sampurnan Bungah Gresik
 2007-2010 : SMA Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik
 2010-2017 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2010-2011 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki Malang
 2011-2012 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris UIN Maliki Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Training ESQ (A Preview By Leadership Center Malang) dalam Serangkaian Gelegar Haflah Muharrom 1432 H Mabna Ummu Salamah Tahun 2010

- Peserta Pelatihan Manasikh Haji yang diselenggarakan oleh MSAA Tahun 2010
- Peserta Seminar Pajak “Profesi Konsultan Pajak dan Reformasi Pajak” yang diselenggarakan oleh HMJ Akuntansi UIN Maliki Malang Tahun 2011
- Peserta Seminar Nasional Perpajakan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak RI bekerja sama dengan UIN Maliki Malang Tahun 2012
- Peserta Pelatihan dan Stimulasi Pasar Modal Pojok Bursa BEI di UIN Maliki Malang Tahun 2012
- Peserta Pelatihan SPSS di Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang Tahun 2013

Malang, 20 Juli 2017

Qurrotul ‘ainia

BUKTI KONSULTASI

Nama : Qurrotul 'Ainia

NIM/Jurusan : 10520030 / Akuntansi

Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA

Judul Skripsi : Penerapan Akuntansi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Suka Makmur" Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	18 Februari 2014	Bimbingan Judul	1. 
2	24 Februari 2014	ACC Judul	2. 
3	20 Maret 2014	Bimbingan Bab I, II, III	3. 
4	03 April 2014	Revisi Bab I, II, III	4. 
5	14 April 2014	Revisi dan ACC Proposal	5. 
6	30 April 2014	ACC Proposal setelah Sempro	6. 
7	16 April 2017	Bimbingan Bab I, II, III, IV	7. 
8	05 Mei 2017	Acc Ujian Kompre	8. 
9	08 Juni 2017	Revisi Bab IV dan Bab V	9. 
11	21 Juni 2017	Revisi dan Acc Sidang Skripsi	10. 

Malang, 21 Juni 2017

Diketahui:

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Nanik Wahyuni, SE., MSI., Ak., CA

NIP. 197203222008012005